



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN DEWAN TOURISME INDONESIA DALAM  
MENUNJANG PARIWISATA DI INDONESIA  
(1957-1965)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Humaniora**

**TIKO DWIANTORO FUTTRO  
0706280025**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
DEPOK  
JUNI 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 29 Juni 2012



**Tiko Dwianto Futro**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip dan dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Tiko Dwiantoro Futtro**

**NPM : 0706280025**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 29 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Tiko Dwiantoro Futtro  
NPM : 0706280025  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam  
Menunjang Pariwisata di Indonesia (1957-1965)

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

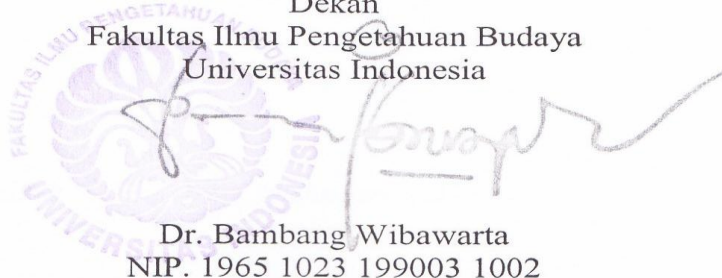
Ketua/Penguji : Dr. Magdalia Alfian  
Pembimbing : Dr. Ita Syamtasyah Ahyat S.S, M.Hum  
Penguji : Siswantari, M.Hum  
Panitera : Abdurakhman, M.Hum



Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok  
Tanggal : 29 Juni 2012

oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 1965 1023 199003 1002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“As a reminder, that sometimes, history gives great enough opportunity to those with ideals and who struggle to test their ability to realize their dreams”*

**(Sjahrir)**



*Dipersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT, Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya bagi kehidupan kita semua. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Skripsi ini berjudul Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam Menunjang Pariwisata di Indonesia (1957-1965). Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk meneliti perkembangan pariwisata Indonesia pada masa Orde Lama. Ketertarikan penulis terhadap tema tersebut karena perkembangan pariwisata di Indonesia khususnya pada masa Orde Lama merupakan fase penting dalam memajukan pariwisata di tanah air. Namun sangat disayangkan belum banyak tulisan yang mengungkapkan tentang usaha-usaha pemerintah dan juga masyarakat dalam mengembangkan pariwisata Indonesia di era Presiden Soekarno. Mudah-mudahan dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai pariwisata Indonesia di masa Orde Lama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada Dr. Ita Syamtasyah Ahyat S.S, M.Hum (Mba Ita) selaku pembimbing yang telah memberikan saran, koreksi, arahan dan meyakinkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu dosen-dosen Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Mas Maman, Mas Bondan dan dosen lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Sudjoko Darmain dan Eti Suharyati yang telah memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih kepada Papa yang tak kenal lelah bekerja untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Kepada Mama yang selalu berdoa dan memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan studinya. Kepada Mas Indra, Tiwie dan Mijiel yang selalu memberikan canda dan tawa, dukungan dan hiburan disaat penulis sedang suntuk dan bosan di rumah juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman, sahabat dan handai taulan di Program Studi Ilmu Sejarah angkatan 2007. Kepada Wahyu Tri Laksono ketua Studi Klub Sejarah periode 2009-2010 yang telah memberikan sebuah pengalaman menarik kepada saya, untuk dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Baur dan Kadiv Media. Kepada Enrico Yoland yang selalu berjuang bersama saya saat bimbingan dan mencari data untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada Dody Adhila dan Tyson Tirta yang menjadi lawan tanding catur di sela-sela perkuliahan. Terima kasih juga kepada Indra Citra Sena yang sudah rela mendengarkan ocehan dan celotehan saya mulai dari yang akademis maupun non-akademis. Kepada para anggota tim futsal “Kampang FC”, M. Fazrin, Teguh Limas Sarendra, Inu Kertapati, Gabe Sultan Gilbert, Fikri, Fahmi Firmansyah, Fatkhur Rozaq, Asca Putera, Arief Bungaran Sitohang, Rahdil Pahlevi, Ibrahim Febriyanto. Terima kasih juga ucapkan kepada tim pendaki gunung, Michael Agustinus, Agung Wibowo, Tri Ilham Pramudya (Bob), dan M. Gilang yang memberikan pengalaman berharga ketika bersama-sama mendaki gunung.

Untuk teman-teman angkatan 2007 lainnya Armelia Citra, Adelia Wulandari, Gadis Alun, Gemita Tranka, Hafsari Amini, Ika Apriani, Inesya Hartono, Marcia Bernadeth Tetelepta, Nurul Fadhila, Rayi Estriyani, dan Zakiyah Egar Imani, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian semua telah memberikan semangat, dukungan, persahabatan dan kenangan indah yang tidak akan saya lupakan selama masa perkuliahan.

Terima kasih juga penulis berikan kepada teman-teman Sejarah angkatan 2004, Ivan, Fikri, Arif, Sulai, Adit yang selalu membuat *joke-joke* luar biasa. Sejarah angkatan 2005 Mizar, Popon, dan Radit; Sejarah angkatan 2006 Boik, Rima, dan Ilho. Sejarah 2008 Cindy, Debby, Olly, dan khususnya Paskalis Dimas yang banyak membantu ketika saya masih menjadi Pemred Baur. Sejarah 2009, Adit, Hary, Tituk, Koko dan lainnya; Sejarah 2010 dan 2011 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman lainnya yang ikut membantu dan mendukung penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, kepada Hendro, Meta, Komeng, Icha, Rifa, Yuristia Aprilisani, Kak Eka, Kak Udin. Untuk anak-anak 26 Hasan, Edvan, Apau, Kukuh dan Galuh yang selalu menemani dan menghibur penulis di saat sedang buntu mengerjakan dalam skripsi dan pihak-pihak lainnya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka, segala kritik dan saran yang ditujukan untuk menanggapi tulisan ini akan penulis terima dengan sikap terbuka. Saya berharap agar kiranya skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Depok, 29 Juni 2012

Tiko Dwiantoro Futtro



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiko Dwiantoro Futtro  
NPM : 0706280025  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam Menunjang Pariwisata di Indonesia (1957-1965)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Tiko Dwiantoro Futtro)

## ABSTRAK

Nama : Tiko Dwiantoro Futtro  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam Menunjang  
Pariwisata di Indonesia (1957-1965)  
Pembimbing : Dr. Ita Syamtasyah Ahyat S.S, M.Hum.

Penelitian yang berjudul Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam Menunjang Pariwisata Indonesia (1957-1965), membahas mengenai perkembangan pariwisata di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda hingga terbentuknya Dewan Tourisme Indonesia atau DTI. Alasan pemilihan pariwisata sebagai judul penelitian ini adalah karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian dan sumber penerimaan devisa negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan peranan dari Dewan Tourisme Indonesia dalam mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Tourisme Indonesia telah menjadi badan atau organisasi kepariwisataan pertama di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Peran Dewan Tourisme Indonesia dalam mengembangkan pariwisata Indonesia diawali dengan masuknya Indonesia dalam organisasi kepariwisataan dunia seperti *PATA* dan *IUOTO* hingga menyelenggarakan *Indonesian Floating Fair 1961*, *12<sup>th</sup> PATA Conference 1963* dan ikut dalam *New York World's Fair 1964-1965* di Amerika Serikat.

Kata Kunci: Pariwisata, DTI, Depari, *Indonesian Council for Tourism*

## ABSTRACT

Name : Tiko Dwiantoro Futtro  
Study Program : History  
Title : The Role of Indonesian Council for Tourism in Supporting  
Tourism in Indonesia (1957-1965)  
Adviser : Dr. Ita Syamtasyah Ahyat S.S, M.Hum

The study, entitled *The Role of Indonesian Council for Tourism in Supporting Tourism in Indonesia from 1957 to 1965*, discusses to the development of Indonesia tourism since the Dutch colonial era until the establishment of Indonesia Council for Tourism or DTI. This title is selected because tourism in Indonesia is an important component of the Indonesia economy as well as a significant source of its foreign exchange revenue. The purpose of this study is to describe the role of the Indonesia Council for Tourism in developing tourism in Indonesia, due to the Orde Lama era. This study uses historical method as its research method, which consists of four steps: Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this study indicate that the Indonesia Council for Tourism had became the first tourism board or organizations in Indonesia which was showed directly by the government to developed tourism in Indonesia. The role of Indonesia Council for Tourism in developing Indonesia tourism was began with entering Indonesia became a part of world tourism organizations such as *PATA* and *IUOTO*. Moreover, Indonesia also presented the *Indonesian Floating Fair 1961*, the *12<sup>th</sup> PATA Conference 1963* and joined to the *New York World's Fair 1964-1965* in the United States.

Keyword : Tourism, DTI, Depari, Indonesia Council for Tourism

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>ii</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ix</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>	
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>	
<b>GLOSARI</b> .....	<b>xiii</b>	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1	
1.2. Tinjauan Pustaka .....	5	
1.3. Rumusan Masalah .....	6	
1.4. Tujuan Penelitian .....	6	
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	7	
1.6. Metode Penelitian .....	7	
1.7. Sistematika Penulisan .....	8	
<b>BAB II</b>	<b>Kondisi Pariwisata di Indonesia Sebelum Tahun 1957</b>	
2.1. Pariwisata Indonesia Masa Kolonial Belanda .....	9	
2.2. Pariwisata Indonesia Masa Pendudukan Jepang .....	20	
2.3. Pariwisata Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan .....	20	
<b>BAB III</b>	<b>Kondisi Pariwisata di Indonesia Setelah Tahun 1957</b>	
3.1. Perkembangan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi di Indonesia .....	24	
3.2. Pembentukan Yayasan Tourisme Indonesia .....	35	
3.3. Pembentukan Dewan Tourisme Indonesia .....	38	
<b>BAB IV</b>	<b>Perkembangan Pariwisata di Indonesia 1957-1965</b>	
4.1. Promosi Pariwisata Indonesia .....	40	
4.2. Perubahan nama menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) .....	55	
<b>BAB V</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68	
<b>LAMPIRAN</b> .....	71	

## GLOSARI

*Great Depression* (Depresi Berat) :

Depresi ekonomi paling parah yang melanda dunia dimulai sejak tahun 1930.

*International Union of Official Travel Organizations* (IUOTO) :

Organisasi kepariwisataan dunia non pemerintah yang berdiri sejak tahun 1925. Dalam perkembangan berikutnya IUOTO di menjadi badan konsultatif PBB di bidang kepariwisataan. Pada tahun 1970 organisasi ini berubah nama menjadi UNWTO (United Nation World Tourism Organization).

*Marshall Plan* :

program skala besar yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Marshall untuk membantu negara-negara Eropa dimana Amerika Serikat memberi bantuan dana untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat setelah Perang Dunia II dan juga untuk pencegahan penyebaran komunisme.

*Vereeniging Toeristen Verkeer* (VTV) :

Perhimpunan turisme pertama di Hindia Belanda yang berdiri tanggal 13 April 1908 di Weltevreden, Batavia.

*Tour operator* :

Orang atau badan yang mengatur perjalanan wisata.

*Travel Agent* :

Agen perjalanan.

*Nitour* (Nederlandsche Indische Touristen Bureau) :

Perusahaan perjalanan milik Belanda yang didirikan sejak tahun 1936. Ketika terjadi Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Nitour berganti kepemilikan dan namanya di ubah menjadi *National and Internatioanal Tourism Beureau*.

*KPM* (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) :

Perusahaan pelayaran kerajaan milik Belanda yang berdiri sejak tahun 1888. Pada tahun 1957 KPM di nasionalisasi pemerintah Indonesia dan sebagian armada kapalnya menjadi milik Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

*KNILM* (Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij) :

Perusahaan penerbangan Hindia Belanda yang berdiri sejak 1 November 1928.

*KMB* (Konferensi Meja Bundar) :

Konferensi atau pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang membicarakan tentang penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda.

*ABHINI* (Algemeenen Bond Hotelhouders in Nederlandsch-Indie) :  
Perhimpunan pemilik hotel di Hindia Belanda yang meliputi *Kring* (daerah) Preanger, Batavia, Midden-Java (Jawa Tengah), Oost-Java (Jawa Timur), di luar kring (Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku).

*RAPWI* (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) :  
Badan Pemulihan Tahanan Perang Sekutu dan Interniran.

*HONET* (Hotel Negara dan Tourism) :  
Badan pemerintah yang didirikan tanggal 1 Juli 1947 ini ditugaskan untuk mengelola hotel-hotel bekas milik Belanda.

*Sergahti* (Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia) :  
Lembaga bentukan pemerintah yang ditujukan untuk mempromosikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata.

*Intersulair* :  
Pelayaran antar pulau.

*PELNI* (Pelayaran Nasional Indonesia) :  
Perusahaan pelayaran milik pemerintah Indonesia yang berdiri sejak tahun 1952.

*GIA* (Garuda Indonesia Airways) :  
Perusahaan penerbangan sipil milik pemerintah Indonesia.

*YTI* (Yayasan Tourisme Indonesia) :  
Organisasi independen atau swasta yang berdiri tahun 1955 dan berusaha untuk memajukan kegiatan pariwisata di Indonesia. Pada tahun 1957, organisasi ini berubah menjadi Dewan Tourisme Indonesia atau DTI.

*DTI* (Dewan Tourisme Indonesia) :  
Organisasi atau badan kepariwisataan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang berdiri sejak tahun 1957 sampai tahun 1965. Tugas dari badan ini adalah untuk memajukan pariwisata Indonesia.

*PATA* (Pacific Asia Travel Association) :  
Organisasi kepariwisataan non-profit di kawasan Samudera Pasifik yang dibentuk pada tahun 1951 di Hawaii dan berkantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat.

*WATA* (World Association of Travel Agencies) :  
Perhimpunan agen-agen perjalanan internasional.

*ASTA* (American Society of Travel Agents) :  
Organisasi biro perjalanan Amerika yang didirikan sejak tahun 1931.

*Visa :*

Izin masuk atau tinggal sementara dari suatu negara untuk seseorang yang bukan warga negaranya yang akan memasuki wilayah negara itu.

*Devisa :*

Semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia (seperti US Dollar (\$), Yen Jepang, Euro, Poundsterling Inggris), emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, dan lainnya.

*Travel Bureau :*

Perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang, termasuk kelengkapan dari suatu tempat ke tempat lain baik di dalam negeri, ke luar negeri atau dalam negeri itu sendiri.

*Visit The Orient Year :*

Program yang dijalankan oleh IUOTO dalam rangka memajukan pariwisata di wilayah Asia Pasifik.

*NBC (National Broadcasting Company) :*

Jaringan televisi Amerika yang berkantor di New York, Amerika Serikat.

*Asian Games :*

Ajang olahraga yang diselenggarakan setiap empat tahun, dengan atlet-atlet dari seluruh Asia.

*Depari (Dewan Pariwisata Indonesia) :*

Dewan ini merupakan kelanjutan dari Dewan Tourisme Indonesia yang saat itu diubah namanya pada tahun 1960.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latarbelakang

Sejak dahulu manusia sudah mengenal dan melakukan kegiatan perjalanan atau *traveling*. Pada perkembangannya, perjalanan atau *traveling* menjadi suatu kegiatan yang berkembang di masyarakat dan dikenal dengan istilah *tourism* atau pariwisata. Menurut James J. Spillane, pariwisata secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian hidup.<sup>1</sup> Pariwisata dalam perkembangannya tidak hanya menjadi salah satu sumber devisa negara tetapi juga sebagai suatu faktor penggerak ekonomi lainnya seperti transportasi, komunikasi dan akomodasi. Seorang ahli ekonomi Austria, Hermann V. Schulard menjelaskan bahwa pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.<sup>2</sup>

Kegiatan pariwisata modern mulai mengalami kemajuan pada awal abad ke 20. Apalagi setelah ditemukannya kapal uap dan pesawat terbang.<sup>3</sup> Sebelum Perang Dunia I, kegiatan wisata di dunia merupakan kegiatan yang terbatas dan hanya bisa dinikmati pada golongan atas. Setelah Perang Dunia I usai, perekonomian dunia mengalami fluktuasi antara peningkatan kemakmuran, depresi, pemulihan kembali, dan disusul dengan depresi berat (*Great Depression*). Di masa-masa sulit tersebut muncul sebuah organisasi yang didirikan tahun 1925 yaitu *International Union of Official Organizations for Tourist Propaganda* atau yang kemudian dikenal dengan

---

<sup>1</sup> James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.1987.hal. 21

<sup>2</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1990.hal.105.

<sup>3</sup> Dennis L. Foster. *First Class an Introduction to Travel & Tourism*, terj. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. hal. 12.



*International Union of Official Travel Organizations* (IUOTO) yang mengusahakan agar kegiatan wisata tetap berlangsung.<sup>4</sup>

Setelah Perang Dunia ke II berakhir, negara-negara di Eropa yang hancur akibat perang mendapatkan bantuan Amerika Serikat melalui *Marshall Plan*<sup>5</sup>. Dengan bantuan tersebut negara-negara di Eropa mulai berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyatnya. Dengan membaiknya perekonomian, masyarakat sudah mempunyai uang tabungan. Oleh karena itu, masyarakat golongan menengah ini juga ingin menikmati kemewahan yang sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh golongan bangsawan dan orang-orang kaya. Mereka banyak yang menghabiskan uang tabungan mereka untuk melakukan kegiatan wisata, seperti tinggal di hotel-hotel mewah dan juga makan di restoran-restoran yang mahal.<sup>6</sup>

Kegiatan pariwisata di Indonesia sebenarnya telah dirintis sejak jaman kolonial Belanda. Saat itu Gubernur Jenderal Van Heutsz memerintahkan untuk dibentuknya suatu badan yang menjadi *official tourist bureau* Hindia Belanda yaitu *Vereeniging Toeristen Verkeer* (VTV). Van Heutsz melihat potensi pariwisata Hindia Belanda yang dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif penerimaan kas negara selain dari sektor perdagangan dan pertambangan. VTV selain menjadi *tourist government office* juga bertindak sebagai *tour operator* dan *travel agent* karena pada saat itu hanya badan ini yang baru berdiri. Pada tahun 1920an mulai muncul berbagai *travel agent* dan organisasi kepariwisataan lainnya yang ikut

---

<sup>4</sup> H. Kodhyat. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996. hal. 40

<sup>5</sup> *Marshall Plan* atau Rencana Marshall adalah program skala besar yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Marshall untuk membantu negara-negara Eropa dimana Amerika Serikat memberi bantuan dana untuk membangun kembali ekonomi Eropa Barat setelah Perang Dunia II dan juga untuk pencegahan penyebaran komunisme.

<sup>6</sup> H. Kodhyat. *op.cit.*, hal. 41.

mengembangkan pariwisata di Hindia Belanda seperti NITOUR, Tourist Association of Garoet, Tourist Association of Magelang, Bandung Vooruit dan lain lain.<sup>7</sup>

Untuk mempromosikan turisme Hindia Belanda, VTV sebagai *tourist government office* bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain yaitu KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), KNILM (*Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij*), dan juga hotel-hotel untuk mengakomodasi para turis asing.<sup>8</sup> Dengan kerjasama itu pemerintah Hindia Belanda berhasil menarik wisatawan asing dan jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1942, Jepang mulai masuk ke Indonesia. Perang Dunia ke II yang terjadi di Asia dan Eropa juga menyebabkan kegiatan kepariwisataan tidak berjalan sama sekali. Pada masa pendudukan Jepang rakyat Indonesia mengalami masa-masa yang sulit. Objek-objek wisata yang telah dibangun pemerintah kolonial Belanda ditinggalkan dan terbengkalai. Jalan-jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya banyak yang rusak dan dihancurkan oleh Jepang. Banyak sedangkan hotel-hotel yang diambil alih oleh Jepang dan dijadikan rumah sakit, asrama dan hotel yang agak bagus ditempati oleh perwira-perwira sebagai tempat tinggal, yang pada saat itu disebut Heitan Ryokan.<sup>9</sup>

Pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang oleh Sekutu ini direspon para pemimpin Indonesia dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan baru ini dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Dengan berdirinya Republik Indonesia, usaha untuk memperbaiki perekonomian segera dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Oka A. Yoeti.*op.cit.*hal. 34.

<sup>8</sup> Achmad Sunjayadi, *Vereeniging Toeristen Verkeer Batavia (1908-1942) Awal Turisme Modern di Hindia Belanda* .Depok, FIB UI, 2007. hal. 49.

<sup>9</sup> Oka A. Yoeti.*op.cit.*, hal.37.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 38.

Namun dengan adanya gangguan-gangguan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri membuat perekonomian Indonesia masih sulit untuk berkembang. Setelah melalui perjuangan dan perundingan yang panjang akhirnya pihak Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, secara resmi mengakui kedaulatan bangsa Indonesia.<sup>11</sup> Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini, pemerintah berusaha untuk membangun ekonomi nasional yang hancur akibat perang. Salah satu sektor yang nantinya juga akan dibangun pemerintah adalah sektor pariwisata.

Usaha pertama pemerintah adalah membentuk badan yang disebut HONET (*Hotel Negara dan Tourism*). Badan ini diketuai oleh R. Tjipto Ruslan. HONET berada dibawah lingkungan Kementerian Perhubungan, yang tugasnya adalah untuk melanjutkan pengelolaan hotel-hotel bekas milik Belanda. Di bawah manajemen HONET hotel-hotel yang terdapat di daerah Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokerto, Pekalongan, semua namanya diganti menjadi Hotel Merdeka.<sup>12</sup>

Setelah KMB ditandatangani pada tahun 1949, maka menurut perjanjian tersebut semua harta kekayaan milik Belanda yang berada di Indonesia harus dikembalikan kepada pemiliknya, termasuk hotel. Dengan begitu, HONET secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh suatu badan yang bernama NV. Honet, yang merupakan satu-satunya badan usaha Bangsa Indonesia dalam aktivitas di bidang perhotelan dan pariwisata. Setelah kedaulatan Indonesia didapat, kondisi perekonomian dan keamanan di Indonesia semakin membaik. Pemerintah mulai memperhatikan sektor pariwisata sebagai sektor yang di anggap penting. Pada tahun 1950-1965, banyak muncul keputusan-keputusan penting dibidang pariwisata seperti, pembentukan *Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme*, SERGAHTI (*Serikat*

---

<sup>11</sup> M.C.Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.2005.hal.350.

<sup>12</sup> H. Kodhyat. *Op.cit.*,hal.38.

*Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia*), YTI (*Yayasan Tourisme Indonesia*), DTI (*Dewan Tourisme Indonesia*), DEPARI (*Dewan Pariwisata Indonesia*).

## 1.2. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber yang dikategorikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer<sup>13</sup> yang digunakan adalah berupa buku-buku panduan pariwisata atau *guide book* untuk melengkapi sumber-sumber yang ada seperti *Buletin Tourisme, Warta Pariwisata, Majalah Tourista, Melantjong di Indonesia, Pedoman Tamasja Djakarta dan sekitarnya*. Selain itu surat-surat keputusan pemerintah tentang pembentukan organisasi pariwisata juga akan digunakan dalam penelitian ini.

Sumber sekunder<sup>14</sup> yang digunakan penulis merupakan buku-buku yang berhubungan dengan kepariwisataan di Indonesia. Sumber pertama adalah buku yang ditulis oleh Oka A. Yoeti yang berjudul *Pengantar Ilmu Pariwisata* yang berisi tentang dasar-dasar ilmu pariwisata dan juga sejarah pariwisata Indonesia dari jaman kolonial hingga Pelita II. Buku lainnya adalah yang ditulis oleh Nyoman S. Pedit yang berjudul *Ilmu Pariwisata: sebuah pengantar perdana*. Buku ini juga hanya menjelaskan tentang pariwisata Indonesia pada masa Orde Baru sedangkan pariwisata Indonesia di masa Orde Lama hanya sekilas saja. Buku karangan James J. Spillane yang berjudul *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* juga hanya sekilas membahas tentang perkembangan pariwisata dimasa Orde Lama.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang kepariwisataan Indonesia adalah skripsi S1 yang ditulis oleh Inawati yang berjudul "**Pariwisata Indonesia 1900-Pelita IV**". Dalam skripsi itu dijelaskan tentang perkembangan kepariwisataan

---

<sup>13</sup> Sumber primer adalah kesaksian dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain. Lihat : Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. (tej. Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI-Press. 1986, hal. 35.

<sup>14</sup> Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. *Ibid*.

di Indonesia mulai dari jaman kolonial hingga Pelita IV. Karena pembahasan mengenai pariwisata di jaman Orde Lama masih sedikit terutama penulisan tentang Dewan Tourisme Indonesia, maka penulis tertarik untuk memilih topik ini sebagai topik penelitian. Penelitian ini difokuskan pada peranan DTI dalam mengembangkan Pariwisata di Indonesia. Aspek-aspek yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah kebijakan aspek politik, ekonomi dan aspek lainnya yang berhubungan dengan kepariwisataan pada saat itu. Oleh karena itu penulis berharap dapat melengkapi informasi mengenai peran Dewan Tourisme Indonesia dalam Menunjang Pariwisata di Indonesia 1957-1965.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Pariwisata pada jaman Orde Lama merupakan masa dimana Indonesia berusaha untuk mengembangkan pariwisata tanah air dalam rangka memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Dewan Tourisme Indonesia mengembangkan pariwisata Indonesia tahun 1957-1965. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka beberapa pertanyaan penelitian diajukan guna membantu penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pariwisata Indonesia sebelum kemerdekaan?
2. Bagaimana kondisi pariwisata di Indonesia pada tahun 1945-1957?
3. Apa saja Peran Dewan Tourisme Indonesia dalam pengembangan pariwisata Indonesia di tahun 1957-1965?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Setelah Indonesia merdeka pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor yang mulai diperhatikan pemerintah untuk menunjang perekonomian. Pada tahun 1950an merupakan masa-masa dimana Indonesia mulai membangun dan mengembangkan industri pariwisatanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

perkembangan pariwisata di Indonesia pada masa Orde Lama<sup>15</sup> khususnya tentang peran Dewan Tourisme Indonesia dalam perkembangan pariwisata di Indonesia 1957-1965. Perkembangan sektor lainnya yang menunjang kepariwisataan seperti transportasi dan akomodasi juga dibahas dalam penelitian ini.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan dibatasi pada peranan lembaga pemerintah yaitu Dewan Tourisme Indonesia 1957-1965. Tahun 1957 dipilih karena pada tahun ini Dewan Tourisme Indonesia (DTI) berdiri. Pada tahun-tahun berikutnya banyak usaha yang dilakukan oleh DTI sebagai lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah untuk memajukan kepariwisataan di tanah air. Akhir periode penelitian ini dipilih tahun 1965, karena pada tahun ini terjadi pergolakan politik di Indonesia yang juga ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor pariwisata yang mengakibatkan dibubarkannya DTI.

### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahapan metode sejarah, yaitu tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama adalah tahap heuristik dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai sumber penelitian yang berhubungan dengan pariwisata di Indonesia khususnya pada masa Orde Lama. Data-data tersebut berupa buku-buku, artikel, majalah, *guide book*, dan lain-lain. Data-data kepustakaan diperoleh dari Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, dan Perpustakaan Nasional. Sumber mengenai kepariwisataan di tahun 1950an ternyata banyak ditemukan di Perpustakaan FIB UI dan Perpustakaan Nasional. Sedangkan di Perpustakaan Pusat UI hanya ditemukan beberapa buku mengenai teori-teori dasar mengenai pariwisata.

---

<sup>15</sup> Masa Orde Lama atau masa kepemimpinan Presiden Soekarno terbagi menjadi dua periode yaitu Masa Demokrasi Liberal (parlementer) 1950-1959 dan Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965.

Tahapan kedua, kritik sumber (kritik intern dan ekstern), penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh dan mengecek kembali apakah sumber tersebut relevan untuk digunakan untuk penelitian ini.

Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi. Pada tahap ini penulis berusaha untuk memunculkan sumber-sumber yang ada dan menganalisis fakta-fakta sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari data-data yang diuji untuk dapat ditulis.

Tahap historiografi adalah tahap terakhir dan penulis menuangkan hasil dari penelitiannya dalam bentuk tulisan dimana fakta-fakta sejarah yang didapat dirangkai dan disusun secara kronologis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini tersusun atas lima bab. Bab pertama, berisi latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan sumber penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan membahas tentang kondisi pariwisata sebelum kemerdekaan atau jaman kolonial Belanda dan pariwisata pada masa pendudukan Jepang.

Bab ketiga penulis akan memaparkan tentang perkembangan sarana penunjang kepariwisataan yaitu transportasi dan akomodasi di Indonesia. Terbentuknya badan-badan atau organisasi yang berhubungan dengan kepariwisataan di Indonesia yaitu Yayasan Tourisme Indonesia dan Dewan Tourisme Indonesia akan dibahas dalam bab ini.

Bab keempat akan membahas peran Dewan Tourisme Indonesia dalam mempromosikan pariwisata Indonesia tahun 1957-1965.

Bab terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan bab sebelumnya.

## BAB II

### Kondisi Pariwisata di Indonesia Sebelum Tahun 1957

#### 2.1. Pariwisata Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda

Pariwisata modern yang kita kenal sekarang ini tidak bisa dipisahkan dengan orang yang bernama Thomas Cook. Untuk pertama kalinya Thomas Cook pada tanggal 5 Juli 1841 menyelenggarakan apa yang kita kenal sekarang dengan paket wisata atau *inclusive tour*.<sup>16</sup> Perjalanan ini dilakukan dengan menggunakan kereta api dari Leicester ke Loughborough untuk melihat sebuah pameran disana. Berkat promosi yang dilakukannya melalui iklan, jumlah peserta paket wisata itu mencapai 570 orang.<sup>17</sup> Dengan keberhasilan ini, Thomas Cook mendirikan sebuah perusahaan dengan menggunakan namanya sendiri. Perusahaan ini berkembang pesat dan memperluas penyelenggaraan paket wisata ke daratan Eropa, Amerika, dan negara-negara lainnya. Setelah perusahaan ini berdiri dan sukses, maka mulai muncul perusahaan-perusahaan perjalanan lain.

Setelah Aceh ditaklukan, wilayah Hindia Belanda telah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Hindia Belanda semakin aman untuk dikunjungi baik oleh orang-orang Belanda maupun oleh orang Eropa lainnya. Meningkatnya perdagangan antara Eropa dan Asia juga mengakibatkan meningkatnya orang-orang yang melakukan perjalanan dengan bermacam-macam motif sesuai dengan keperluan masing-masing.<sup>18</sup> Mereka yang datang ke Hindia Belanda ada yang datang untuk berdagang dan ada juga yang berkunjung untuk melihat-lihat keindahan alam yang eksotis<sup>19</sup> dari Hindia Belanda. Kegiatan kepariwisataan masa kolonial dimulai sejak tahun 1908, setelah keluarnya keputusan Gubernur Jenderal Van Heutsz atas

---

<sup>16</sup> Paket wisata atau *inclusive tour* adalah wisata yang ditawarkan pada harga yang ditentukan dan termasuk komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi dan transfer.

<sup>17</sup> H. Kodhyat.*op.cit.* hal.29

<sup>18</sup> Yoeti.*op.cit.*, hal.24-25.

<sup>19</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *eksotis* berarti memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal secara umum.



pembentukan *Vereeniging Toeristen Verkeer* (VTV) yang merupakan suatu badan atau *official tourist bureau* pada masa itu. Dengan keputusan gubernur jenderal ini, memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial juga memperhatikan sektor kepariwisataan yang merupakan salah satu penghasil devisa selain dari sektor perdagangan. Untuk mendukung promosi pariwisata tersebut maka pemerintah kolonial pada saat itu mengikutsertakan Hindia Belanda dalam pameran-pameran di Eropa.<sup>20</sup>

Didirikannya VTV pada tahun 1908 merupakan tonggak awal bagi pariwisata di nusantara. VTV bertugas untuk mengembangkan pariwisata di Hindia Belanda. Untuk mengembangkan itu VTV bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Hindia Belanda seperti KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), KNILM (*Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij*), JMC (*Java Motor Club*), ABHINI (*Algemeenen Bond Hotelhouders in Nederlandsch-Indie*)<sup>21</sup>, *Staatsspoor-en Tramwegen*. Tugas VTV sendiri adalah untuk mempromosikan Hindia Belanda yang telah aman untuk dikunjungi oleh para turis asing. Dalam menjalankan tugasnya, VTV memerlukan banyak biaya untuk promosi, untuk itu pemerintah Hindia Belanda memberikan subsidi kepada VTV. Promosi yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan atau menerbitkan buku panduan turisme, reklame, peta, majalah, brosur, poster, kartu pos, dan foto. Gambar-gambar atau foto yang disajikan oleh iklan-iklan VTV berupa pemandangan alam yang indah seperti gunung-gunung, candi, maupun penduduk pribumi yang masih tradisional. Selain foto-foto tersebut ada juga foto-foto yang menggambarkan kondisi modern Hindia

---

<sup>20</sup> Achmad Sunjayadi, *Vereeniging Toeristen Verkeer Batavia (1908-1942) Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*. Depok: FIB UI, 2007.hal.23.

<sup>21</sup> A.B.H.I.N.I. adalah perhimpunan pemilik hotel di Hindia Belanda yang meliputi *Kring* (daerah) Preanger, Batavia, Midden-Java (Jawa Tengah), Oost-Java (Jawa Timur), di luar kring (Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku) .

Belanda. Tujuannya sendiri adalah untuk meyakinkan para calon turis mereka yang akan mengunjungi *tropical Holland* di Asia.<sup>22</sup>

Dalam salah satu poster yang diterbitkan oleh *Official Tourist Bureau* tahun 1935 bertuliskan *Visit to Java: Only 36 Hours from Singapore* dengan menggambarkan seorang wanita penari Jawa yang berlatarkan candi dan Pulau Jawa.<sup>23</sup> Poster yang diterbitkan pada tahun 1935 oleh Nitour (*Netherlands Indies Official Tourist Bureau*) dan bertujuan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Jawa yang jaraknya tidak jauh dari Singapura dan hanya dibutuhkan waktu 36 jam. Jarak tempuh 36 jam yang dimaksud adalah untuk perjalanan menggunakan kapal laut, karena pada tahun itu sudah terdapat pesawat terbang yang hanya memerlukan beberapa jam saja untuk sampai ke Jawa dari Singapura.

Wisatawan yang datang untuk berkunjung ke Hindia Belanda pada saat itu jumlahnya tidaklah terlalu banyak, jumlahnya kurang lebih 20.000 orang turis setahun. Pada saat itu tidak hanya VTV yang mempromosikan pariwisata, perusahaan lain seperti Lisind dan Nitour juga ikut mempromosikan pariwisata di Hindia Belanda. Dengan makin meningkatnya kegiatan wisata ke Hindia Belanda maka sebuah perusahaan biro perjalanan Belanda Lissone Lindemann (Lisind) pada tahun 1926 membuka cabangnya di Rijswijk, Batavia (sekarang Jakarta). Perusahaan tour swasta ini mulai mengembangkan kegiatannya sejak 1927. Di tahun ini LISLIND pernah membawa rombongan dari Weltevreden dalam acara Natal ke Preanger Regencies (Jawa Barat) dan Central Java (Jawa Tengah). Tempat-tempat yang dikunjunginya adalah Bandung, Garut, Jogya dalam tempo enam hari dengan tarif f.140 per orang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Achmad Sunjayadi.*op.cit.*, hal. 60.

<sup>23</sup> Lihat Lampiran 6.

<sup>24</sup> Oka A.Yoeti.*op.cit.*hal.31

Selain LISLIND perusahaan lain yang bergerak dibidang tour operator adalah NITOUR atau *The Nederlandsche Indische Touristen Bureau*. Perusahaan ini adalah anak dari perusahaan pelayaran Belanda yaitu KPM. Nitour juga melakukan promosi keluar negeri dengan menerbitkan majalah *Tourism* yang dikirim sekali dalam sebulan kepada lebih dari 10.000 alamat pembaca di luar negeri.<sup>25</sup> Perusahaan Nitour sendiri merupakan anak perusahaan dari tiga perusahaan Belanda, yaitu KPM, KLM dan Royal Interocean Lines.<sup>26</sup>

Sebelum pecah Perang Dunia II kegiatan kepariwisataan di Hindia Belanda masih sangat terbatas pada golongan *ambtenaar*, yaitu para pegawai Pemerintahan Hindia Belanda yang telah memiliki tingkat sosial dan pendapatan yang mencukupi. Demikian pula halnya dengan golongan lainnya yang tergolong mampu dari segi ekonomi, seperti Indo-Belanda dan orang-orang Tionghoa. Seorang pelancong Inggris bernama Colonel Sir H. Collet, menggambarkan dari pengalamannya berkunjung di Insulinde/ Hindia Belanda bahwa hotel-hotel yang bagus sudah dapat dijumpai hampir di setiap tempat di mana para pelancong biasa singgah. Dan juga para wanita dapat melakukan perjalanan dari satu pulau ke pulau lainnya tanpa harus mengalami sesuatu yang kurang nyaman.<sup>27</sup>

Sejak pertama kemunculannya, biro perjalanan (Travel Agent) menjadi bagian integral dari industri perjalanan, industri pariwisata dan transportasi di seluruh dunia. Sebuah biro perjalanan menjual rancangan perjalanan secara langsung pada masyarakat. Lebih khusus lagi, sebuah biro perjalanan menjual transportasi udara, darat, dan laut; akomodasi penginapan, seperti hotel, losmen, pesanggrahan; pelayaran wisata; paket wisata dan lainnya yang berhubungan.<sup>28</sup> Perkembangan kepariwisataan pada jaman kolonial ternyata mulai mendapatkan perhatian yang

---

<sup>25</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*, hal. 51

<sup>26</sup> Achmad Sunjayadi.*op.cit.*,hal. 47

<sup>27</sup> *Ibid.*,hal. 52

<sup>28</sup> Dennis L. Foster.*op.cit.*, hal. 77.

khusus bagi pemerintah Kolonial Belanda. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Hindia Belanda memang sudah menjadi incaran dari negara-negara lain. Untuk itu Pemerintah Hindia Belanda mengawasi secara ketat ruang gerak atau kunjungan orang-orang asing non-Belanda.<sup>29</sup>

Namun walaupun demikian, kunjungan wisatawan asing tampaknya dianggap cukup penting dalam upaya meningkatkan kas Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, Pemerintah Kerajaan Belanda membuka kantor-kantor perwakilan kepariwisataan di beberapa negara. Salah satu yang dibuka adalah *Official Tourist Bureau for Holland and The Netherlands Indies* di *42 Boulevard Raspail*, Paris, Perancis yang dibuka tahun 1920.<sup>30</sup>

Perkembangan industri dan teknologi juga mempengaruhi perkembangan transportasi di nusantara. Dengan dibukanya jalur penerbangan di Hindia Belanda pada tahun 1928, kendala waktu yang biasanya ditempuh dengan kapal laut selama berhari-hari dapat dipangkas menjadi beberapa jam saja dengan menggunakan pesawat terbang. KNILM sebagai perusahaan penerbangan di Hindia Belanda juga tak kalah dalam membantu mengembangkan pariwisata di Hindia Belanda dengan membuka penerbangan dari Batavia-Bali dan juga Singapura-Bali dalam waktu yang relatif singkat.

Perkembangan transportasi antar negara, khususnya transportasi laut meningkatkan minat masyarakat Belanda maupun masyarakat Eropa untuk berkunjung ke negeri *Untaian Zamrud di Khatulistiwa*, julukan yang diberikan Eduard Douwes Dekker kepada Hindia Belanda. Julukan itu diberikan terutama setelah Terusan Suez dibuka.<sup>31</sup> Salah satu perusahaan yang berperan besar dalam memajukan kepariwisataan di Hindia Belanda adalah perusahaan pelayaran KPM.

---

<sup>29</sup> Achmad Sunjayadi.*op.cit.*,hal. 58.

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata. *Pariwisata Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta, 1985. Hlm. 4.

<sup>31</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 50.

Tugas KPM sendiri adalah untuk mengantarkan turis-turis asing berkeliling wilayah Hindia Belanda dengan kapal-kapal uapnya. Dukungan KPM ini terlihat dengan dioperasikannya dua buah kapal yaitu *Nieuw Holland* dan *Nieuw Zeeland* yang membawa turis Australia ke Hindia Belanda dan Singapura.<sup>32</sup>

Selain transportasi laut, berkembang juga teknologi pada awal abad ke 20 yaitu transportasi udara atau pesawat. Kegiatan wisata ke Hindia Belanda dengan melalui transportasi udara pertama kali dipelopori oleh tiga orang Belanda yaitu Van Weerden Poelman, Van Der Hoop, dan Van Den Broke dengan menggunakan pesawat Fokker F-VII “H-NACC” pada tahun 1924.<sup>33</sup> Di Hindia Belanda sebelumnya hanya ada sebuah perusahaan penerbangan yaitu KLM (*Koninklijke Luchtvaart Maatschappij*) atau perusahaan penerbangan kerajaan Belanda. Karena dirasa sangat penting, maka diupayakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk sebuah komisi dalam rangka mendirikan perusahaan penerbangan di Hindia Belanda. Sebagai utusan komisi itu dikirim D. A. Delprat (direktur *Stoomvaart Maatschappij Nederland*) dan A. Plesman (direktur KLM) untuk berunding dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari perundingan tersebut akhirnya dibawa ke sidang Volksraad, dan usulan itu diputuskan melalui pemungutan suara dengan hasil, 39 menerima dan 9 menolak.<sup>34</sup>

Setelah keputusan itu disetujui, maka dibentuklah perusahaan penerbangan ini dengan nama KNILM atau *Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij*. Pada 1 November 1928, KNILM secara resmi membuka jalur penerbangan yang pertama di Hindia Belanda. Peresmian tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jhr. A. C. D. de Graeff di lapangan terbang Meester Cornelis (Kemayoran), Batavia. Jalur atau rute yang dilayani KNILM ketika

---

<sup>32</sup> Achmad Sunjayadi.*op.cit.*,hal. 47.

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 4.

<sup>34</sup> Achmad Sunjayadi.*op.cit.*,hal. 81.

baru pertama kali mengudara adalah Batavia-Bandung dan Batavia-Semarang.<sup>35</sup> Keberadaan KNILM disambut dengan antusias oleh semua pihak terutama oleh para turis asing yang ingin merasakan pengalaman berbeda dalam menikmati keindahan alam Hindia Belanda. Beberapa lapangan terbang pun mulai dibuka seperti di Surabaya, Palembang, dan Medan.

Pihak lain yang bekerja sama dengan VTV dalam memajukan kegiatan kepawisataan Hindia Belanda adalah JMC (*Java Motor Club*). Tugas JMC sendiri adalah untuk membantu VTV dalam memberikan rambu-rambu dan petunjuk di jalan-jalan untuk memudahkan turis jika ada yang melakukan perjalanan darat. *Staatsspoor-en Tramwegen* sebagai perusahaan kereta api di Hindia Belanda juga ikut mengambil peranan dalam pengembangan pariwisata Hindia Belanda. *Staatsspoor-en Tramwegen* bekerjasama dengan VTV dalam menyebarkan brosur-brosur promosi pariwisata seperti *Do Java by Rail*, *Visit Java and Sumatra*, *Visit Java and Bali* dan juga menerbitkan *Java the Tropical Garden of Eden*.<sup>36</sup>

Kegiatan kepariwisataan tidaklah bisa terlepas dari akomodasi yang mendukungnya. Selain bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkecimpung dalam transportasi, VTV juga bekerja sama dengan hotel-hotel yang tergabung dalam ABHINI (*Algemeenen Bond Hotelhouders in Nederlandsch-Indie*). Orang yang bepergian jauh paling tidak membutuhkan tempat untuk menginap dan beristirahat. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructure*) yang berarti hidup atau kehidupannya tergantung pada banyak atau sedikitnya wisatawan yang datang.<sup>37</sup> Pada saat itu kota-kota besar dipelabuhan merupakan tempat yang ramai dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Para pengusaha melihat bahwa ini menjadi peluang bagi mereka mendirikan bisnis perhotelan. Pada awal abad ke 20 banyak muncul hotel-hotel baru didaerah pedalaman seperti pendirian Palace Hotel di

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 53.

<sup>37</sup> Oka A. Yoeti.*op.cit.*hal. 236.

Malang, Slier Hotel di Solo, Hotel van Hangel, Hotel Preanger, Hotel Homann di Bandung, Grand Hotel di Jogjakarta, Hotel Salak di Bogor.

Awalnya sejarah hotel-hotel di Hindia Belanda, khususnya di Jawa dapat dikatakan diawali dari *Stadsherberg* (penginapan kota) yang berada di dekat pelabuhan.<sup>38</sup> Di Batavia sendiri pada tahun 1900-an telah berdiri banyak hotel dan pension. Pada tahun 1933 tercatat ada 144 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 4139 kamar Double/Single.<sup>39</sup> Beberapa hotel besar dan terkenal antara lain, Hotel des Indes, Hotel der Nederlanden, Hotel Royal, Hotel Cramer dan masih banyak hotel lainnya.

Pada waktu itu Hindia Belanda telah memiliki beberapa hotel yang tersebar di kota-kota besar di Pulau Sumatra, Pulau Jawa dan Pulau Bali yaitu Medan, Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Rata-rata hotel-hotel yang berdiri pada saat itu hanya melayani orang kulit putih saja. Tetapi ada juga hotel yang menyediakan pelayanan bagi orang timur asing/tionghoa dan juga pribumi.<sup>40</sup>

Hotel-hotel di Batavia dibuat oleh pemiliknya senyaman mungkin agar turis yang berkunjung betah berlama-lama menginap. Beberapa hotel memiliki fasilitas yang sudah bertaraf internasional. Hotel des Indes misalnya, pada saat itu memiliki hiburan orkes dan juga pendingin udara (AC).<sup>41</sup> Beberapa turis memilih hotel tidak hanya dari segi fasilitasnya. Ada juga hotel yang letaknya sangat dekat sarana transportasi seperti kereta api dan tram. Hotel “Cramer”, dan Hotel “Orient” di Molenvliet, letaknya sangat dekat dengan kereta api dan Hotel “du Pavillon” di Rijswijkstraat (sekarang Jl. Majapahit) yang letaknya dekat dengan tram listrik.

---

<sup>38</sup> Achmad Sunjayadi, *op.cit.* 14

<sup>39</sup> Oka A. Yoeti., *op.cit.* hal 27.

<sup>40</sup> Tio Tek Hong. *Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: sebuah kenangan 1882-1959*. Depok: Masup Jakarta, 2007. hal. 48.

<sup>41</sup> Achmad Sunjayadi., *op.cit.* hal.107.

Menurut daftar ABHINI (*Algemeene Bond van Hotelhouders In Nederlandsch Indie*) dalam majalah *Het Hotelblad*<sup>42</sup>, ada sekitar 100an hotel yang tersebar di Jawa dan luar Jawa.<sup>43</sup> Selain hotel-hotel yang ada di Batavia, terdapat juga beberapa hotel yang tersedia di luar kota seperti Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, Makassar, dan lain lain. Hotel-hotel tersebut ada yang bertaraf internasional dan ada yang hanya menyediakan penginapan sederhana atau *pension*.<sup>44</sup>

Keadaan kota Batavia pada awal abad ke-20 yang sudah maju seperti kota-kota di Eropa tidak menyurutkan turis untuk berkunjung di Batavia. Di Batavia banyak tempat menarik untuk dikunjungi seperti beberapa monumen bersejarah patung J.P Coen di Waterlooplein, van Heutz monumen di Gondangdia, monumen Aceh di Wilheminapark (sekarang Masjid Istiqlal) dan masih banyak monumen lainnya.<sup>45</sup> Selain itu ada juga *Het Aquarium te Batavia* (kolam yang berisi bermacam-macam ikan air laut maupun ikan air tawar) dengan harga tiket masuk 30 sent, kolam renang di jalan Pasar Minggoe Manggarai, bioskop di Deca Park dan juga hiburan pertunjukan musik di Hotel der Nederlanden, Hotel des Indes, Café la Rotonde, dan Capitol Resturant<sup>46</sup>.

Iklan-iklan mengenai tarif hotel, alamat hotel, nomer telepon hotel, maupun alat transportasi yang dapat digunakan dapat dilihat dari majalah *Gids voor Indie*.<sup>47</sup> Turis yang datang ke Batavia tidak hanya mencari hiburan dan kesenangan. Di jalan Koningsplein West nomer 12, terdapat sebuah museum yang sering disebut dengan Gedung Gajah karena ada patung gajah didepannya. Gedung tersebut merupakan

<sup>42</sup> Majalah *Het Hotelblad* merupakan majalah resmi yang dikeluarkan oleh organisasi ABHINI

<sup>43</sup> *Het Hotelblad*. Juni 1938.

<sup>44</sup> Pension adalah sejenis rumah mirip hotel kecil di mana tamu dapat menyewa kamar dan mendapat makanan. biasanya pension dapat disewakan satu hingga dua bulan.

<sup>45</sup> *Gids voor Indie* Juni. 1934. hal.61

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal.61-62.

<sup>47</sup> *Gids voor Indie* adalah buku panduan untuk turis yang berkunjung ke Hindia Belanda yang dilengkapi dengan foto, peta, objek-objek wisata, dan juga hotel-hotel.



museum yang terkenal didunia dan perpustakaan dari perkumpulan *Bataviaasch Genootschap van Kusten en Wetenschappen* (perkumpulan untuk seni dan ilmu pengetahuan Batavia) yang mengoleksi berbagai macam artefak kuno dan benda-benda bersejarah lainnya juga tersedia bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan tentang Hindia Belanda.<sup>48</sup>

Banyak yang menganggap bahwa kemajuan atau modernisasi di Jawa sudah membuat para turis kurang tertarik lagi untuk mengunjunginya. Kota-kota di Jawa pada awal abad ke-20 sudah seperti kota-kota di Eropa dengan bangunan-bangunannya yang bergaya Eropa.<sup>49</sup> Bali dinilai para turis sebagai “museum hidup” dari kebudayaan Hindu-Jawa yang menjadi warisan Hindu Majapahit yang tersapu dari Jawa saat datangnya agama Islam.<sup>50</sup> Kebudayaan yang masih terjaga inilah yang membuat pemerintahan kolonial berusaha untuk mempromosikan pariwisata ke Bali.

Bali secara resmi dibuka untuk lalu lintas turisme pada tahun 1914, karena pada tahun itu keadaan Bali sudah dianggap cukup damai. VTV sebagai badan turisme Hindia Belanda bekerja sama dengan KPM untuk membuka pelayaran menuju Bali. Pelayaran tersebut dimulai dari Singapura, Batavia, Semarang, Surabaya, Buleleng (pelabuhan Singaraja, Bali) dan Makassar. Jalur pelayaran ini bernama resmi “Bali Express”, namun karena kapal-kapal yang dikirim oleh KPM mengangkut berbagai kebutuhan seperti kopra, kopi, sapi, dan terutama babi, maka sering disindir dengan nama “Babi Express”.

Beberapa tahun setelah itu, perwakilan KPM sebagai wakil resmi dari Official Tourist Bureau di Bali mendirikan kantornya di Singaraja. Tugas dari Official Tourist Bureau ini adalah menyediakan jasa seperti menyewakan taksi lengkap dengan supir dan pramuwisata (pemandu wisata) berbahasa Inggris. Selain itu

---

<sup>48</sup>H.C.C Clockener, Brousson. *Batavia Awal Abad 20* (terj. Achmad Sunjayadi) Depok: Masup Jakarta, 2007. hal.138.

<sup>49</sup> Achmad Sunjayadi, *op.cit.* hal. 70.

<sup>50</sup> Michel Picard. *Bali ; Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta : KPG. 2006. hal. 26.

mereka juga dapat menyewakan kamar di pesanggrahan sesuai dengan pilihannya. Peran biro ini sangat penting dalam perkembangan pariwisata di Bali secara umum karena menyumbang citra Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. Promosi yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan brosur-brosur untuk informasi wisatawan. Isi dari brosur-brosur tersebut memuat tentang tempat-tempat tujuan wisata yang dianjurkan, dengan didahului pengantar singkat tentang masyarakat Bali, sejarahnya, tradisi agamanya dan juga keseniannya.

Untuk mendukung sarana pariwisata, di tahun 1928 KPM membuka Bali Hotel sebagai pengganti pesanggrahan<sup>51</sup> Denpasar. Selain pendirian Bali Hotel, perbaikan-perbaikan juga dilakukan pada pesanggrahan Kintamani. Dengan perbaikan itu jumlah turis yang berkunjung semakin meningkat. Pada tahun 1934 dibuka jalur pelayaran setiap hari dengan kapal feri antara pelabuhan Gilimanuk, Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur. Ditambah lagi dengan pembukaan bandar udara di Tuban, selatan Denpasar di tahun 1938 jumlah turis yang mengunjungi pulau Bali semakin meningkat.<sup>52</sup>

Banyak dari orang-orang Eropa menjuluki Bali sebagai “sorga terakhir”. Julukan itu memberikan banyak sumbangan bagi promosi pulau itu pada abad ke-20. Bali selain alam dan kebudayaannya yang masih asli adalah dimana para perempuan Bali yang cantik dan bertelanjang dada. Gregor Krause, seorang dokter Jerman yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda juga mempunyai peranan yang cukup besar terhadap promosi pariwisata Bali. Pada tahun 1920, Krause menerbitkan sebuah buku berisi hampir 400 foto. Buku tersebut laris dan mendapat sambutan yang baik oleh publik dan sempat diterbitkan berulang kali. Daya tarik utamanya adalah gambar payudara dari perempuan Bali.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan biasanya dimiliki oleh pemerintah pemerintah.

<sup>52</sup> Picard., *op.cit.*. hal. 32.

<sup>53</sup> Adrian Vickers. *Bali: A Paradise Created*. Singapore: Periplus Edition. 1990. hal. 254.

## 2.2. Pariwisata Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang

Terjadinya Perang Dunia ke II di Eropa maupun di Asia menyebabkan berhentinya kegiatan pariwisata di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kegiatan pariwisata yang mayoritas dilakukan orang-orang Belanda juga ikut terhenti. Sejak pendudukan Jepang pada tahun 1942, objek-objek wisata terbengkalai dan juga segala sarana wisata banyak yang diambil alih oleh Jepang. Hotel-hotel peninggalan Belanda ada yang dijadikan rumah sakit atau asrama tentara. Hotel-hotel yang kondisinya lebih baik dijadikan pemukiman oleh para perwira dan petinggi tentara Jepang.<sup>54</sup>

Di tahun 1945, pada akhir masa penjajahan Jepang, Hotel des Indes sempat juga dijadikan markas *RAPWI* (*Recovery of Allied Prisoners of War and Internees*) atau Badan Pemulihan Tahanan Perang Sekutu dan Interniran. Hotel des Indes saat itu dijadikan markas *RAPWI* dan tempat informasi untuk mencari para mantan tawanan perang Jepang dan interniran sekutu. Selain itu tempat ini juga masih berfungsi sebagai tempat penginapan sementara bagi warga Belanda di Indonesia yang ingin dievakuasi ke negeri asalnya.

## 2.3. Pariwisata Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Dengan berdirinya Republik Indonesia, usaha untuk memperbaiki perekonomian segera dilakukan. Sedangkan usaha dari pemerintah pusat dalam memperbaiki sektor kepariwisataan terlihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Wakil Presiden pada saat itu Dr. Moh Hatta di Yogyakarta tentang pendirian suatu badan yang diberi tugas melanjutkan tugas perusahaan-perusahaan hotel bekas Belanda.<sup>55</sup> Badan yang dibentuk oleh pemerintah tanggal 1 Juli 1947 ini disebut

<sup>54</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*, hal. 54.

<sup>55</sup>Yoeti.*op.cit.*, hal.37.

HONET (*Hotel Negara dan Tourism*) dan diketuai oleh R. Tjipto Ruslan. HONET berada dibawah lingkungan Kementrian Perhubungan, yang tugasnya adalah untuk melanjutkan pengelolaan hotel-hotel bekas milik Belanda. Di bawah HONET, usaha yang dilakukan pertama kali adalah hotel-hotel yang terdapat di daerah Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokerto, Pekalongan, semua namanya diganti menjadi *Hotel Merdeka*.<sup>56</sup>

Setelah Konferensi Meja Bundar ditandatangani pada tahun 1949, maka menurut perjanjian tersebut semua harta kekayaan milik pemerintah Belanda maupun orang Belanda yang berada di Indonesia harus dikembalikan kepada pemiliknya, termasuk hotel-hotel yg dikelola oleh HONET. Dengan begitu, HONET secara resmi dibubarkan tahun 1950 dan digantikan oleh suatu badan yang bernama NV. Honet, yang merupakan satu-satunya badan usaha Bangsa Indonesia dalam aktivitas di bidang perhotelan dan pariwisata.<sup>57</sup>

Ditahun 1952 dengan keputusan Presiden RI dibentuk *Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme* yang diketuai oleh Nazir St. Pamuncak (dari Kementrian Luar Negeri) dan Sekertarisnya R.A.M. Sastrodanukusumo (kepala Parket Kejaksaan Agung).<sup>58</sup> Panitia tersebut mengusahakan kemungkinan-kemungkinan terbukanya Indonesia sebagai daerah turisme. Karena panitia ini tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginannya yaitu mempromosikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata maka pada tahun 1953 dibubarkan. Beberapa tokoh perhotelan Indonesia akhirnya berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi yang bernama *Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia* atau yang disingkat SERGAHTI.<sup>59</sup>

Sergahti dibentuk di *Hotel Des Indes* (kemudian namanya diganti menjadi Hotel Duta Indonesia) dan diresmikan oleh Wakil Perdana Menteri K.R.M.T.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.38.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.38.

<sup>58</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1990. Hal. 38.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 39.

Wongsonegoro. Pada saat itu dipilih A. Tambayong pemilik Hotel Orient di Bandung sebagai ketua yang dibantu oleh S Saelan pemilik Hotel Cipayung di Bogor, sedangkan sekertarisnya adalah M. Sungkar Alurmei, direktur Hotel du Pavilion.<sup>60</sup> Sergahti beranggotakan hampir seluruh hotel-hotel di seluruh Indonesia dengan cabang-cabangnya didaerah. Tugas dari badan ini sendiri adalah mengusahakan agar Indonesia dijadikan sebagai *Tourist Destination* atau Daerah Tujuan Wisata.

Setelah Konferensi Asia-Afrika atau KAA yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955, bangsa Indonesia semakin dikenal di dunia Internasional. Hal ini sedikit banyak juga mempengaruhi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun tersebut, Bank Industri Negara mendirikan sebuah perusahaan komersil dengan nama PT. Natour atau *National Hotels & Tourism Corp.* Promotornya adalah Margono Djojohadikusumo dan Mr. Sumanang. Pemimpin perusahaan ini dipimpin oleh Singgih dan S. Hardjowiguno. Natour ini memiliki Hotel Transaera di Jakarta, Hotel Bali, Sindu Beach di Bali, Kuta Beach Hotel, Hotel Garuda di Jogjakarta, Hotel Simpang di Surabaya Hotel Dinya Puri di Semarang dan beberapa hotel lainnya di luar Jawa dan Bali.<sup>61</sup>

Organisasi Sergahti tidak bertahan lama dikarenakan para pengurusnya tidak berhasil menjalankan tugasnya yaitu menetapkan harga / tarif hotel yang diberlakukan oleh pemerintah. Selain itu Sergahti juga tidak berhasil mengosongkan penghuni-penghuni tetap di hotel-hotel. Maksud dari penghuni tetap disini adalah orang yang menempati atau tinggal di hotel yang saat perang kemerdekaan ditinggalkan kosong oleh pemilik aslinya sehingga banyak yang memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Ketika sekretaris dari Sergahti M. Sungkar

---

<sup>60</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*, hal. 55.

<sup>61</sup> Oka. A. Yoeti.*op.cit.*, hal. 39.

Alurmei berangkat ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmunya tentang manajemen perhotelan, organisasi ini menjadi tidak aktif lagi.<sup>62</sup>

Setelah Indonesia merdeka yaitu sekitar awal tahun 1950an, jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia kurang lebih 5000 orang pertahun.<sup>63</sup> Sebagian datang dengan kapal-kapal laut dan sebagian lainnya datang dengan kapal terbang. Pada umumnya, turis-turis asing yang datang hanya mengunjungi pulau Bali saja karena beberapa hal seperti keamanan negara yang belum stabil, dan kekurangan hotel-hotel yang bertaraf internasional, kurangnya infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara masih merupakan rintangan dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia.

Kekurangan-kekurangan tersebut mengakibatkan para turis atau wisatawan tidak mempunyai waktu yang banyak. Lebih dari separuh jumlah turis yang datang hanya tinggal seminggu saja di Indonesia. Keadaan jalan raya yang masih rusak dan kondisinya kurang baik juga merupakan faktor mengapa saat itu perjalanan darat kurang diminati oleh para turis. Jalan-jalan yang baik dan memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Sedangkan kondisi jalan di luar Jawa masih kurang memuaskan.

---

<sup>62</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 7.

<sup>63</sup> Buletin Melantjong di Indonesia. Djakarta: PT. RIO, 1957. hal. 63

## BAB III

### Kondisi Pariwisata di Indonesia Setelah Tahun 1957

#### 3.1. Perkembangan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi

Pariwisata tidak terlepas dengan yang namanya transportasi. Aktifitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi, karena faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan orang untuk melakukan perjalanan wisata. Transportasilah yang dapat menggerakkan banyak orang, dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu kota ke kota lain, dari suatu negara ke negara lain dan sebaliknya. Transportasi menyebabkan pertumbuhan kepariwisataan sangat pesat, kemajuan fasilitas transportasi juga mendorong kemajuan di bidang kepariwisataan dan sebaliknya ekspansi yang terjadi dalam industri pariwisata dapat menciptakan permintaan akan transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa fungsi utama dari transportasi sangat erat hubungannya dengan “accessibility”. Maksudnya frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah dekat. Hal ini mempersingkat waktu dan tentunya akan lebih meringankan biaya perjalanan. Dengan demikian transportasi dapat memudahkan orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu dan salah satunya adalah daerah tujuan wisata. Dalam kepariwisataan sendiri dikenal tiga macam transportasi yang digunakan oleh para wisatawan yaitu, transportasi udara (pesawat terbang), transportasi laut (kapal laut, kapal pesiar), dan transportasi darat (kereta api, bus, mobil, dan lain lain).<sup>64</sup>

Pada tahun 1957 hanya ada beberapa kota yang dimungkinkan untuk dikunjungi oleh turis mancanegara antara lain Medan, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Malang dan Bali. Kota-kota tersebut dapat dikatakan sudah lengkap sarana dan prasarana transportasi pariwisatanya. Para turis yang datang dengan kapal laut atau

---

<sup>64</sup> Oka. A. Yoeti.*op.cit.*, hal. 191.

kapal pesiar dari Eropa dapat melakukan perjalanan dimulai dari Medan. Disana kapal disandarkan di Pelabuhan Belawan, dan para turis dapat melakukan perjalanan singkat ke Danau Toba dengan bis atau mobil.<sup>65</sup>

Dari Medan para turis dapat melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Di Jakarta banyak tempat untuk dikunjungi Museum Arca (sekarang Museum Nasional), Pantai Cilincing, Pasar Baru dan lain lain.<sup>66</sup> Dari Jakarta inilah, para turis dapat melakukan perjalanan darat dengan bus menuju Bandung, Jogjakarta, Malang dan tempat-tempat lainnya di Jawa. Sampai di Surabaya turis dilanjutkan menuju tujuan terakhir yaitu Bali. Bagi turis asing yang berasal dari Amerika Serikat dan Australia dapat melakukan perjalanan dengan rute sebaliknya yaitu Bali-Surabaya-Jogjakarta-Bandung-Jakarta-Medan. Turis yang berkunjung pada awal tahun 1950an kebanyakan merencanakan sendiri perjalanannya ke Indonesia karena sebelum tahun 1957 belum ada badan atau biro resmi dari pemerintah yang menyelenggarakan pariwisata secara terorganisir.<sup>67</sup>

Untuk pelayaran transportasi lokal, KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) sebagai perusahaan milik Belanda yang sejak jaman kolonial melakukan pelayaran intersulair (antar pulau) juga masih dapat melayani karena dari segi jumlah Indonesia masih kekurangan armada kapal laut. Republik Indonesia juga mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran transportasi laut yaitu P.T. Pelayaran Nasional Indonesia atau yang biasa disebut PELNI. KPM dan PELNI bersama-sama melayani pengangkutan barang maupun penumpang antar pulau di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhir tahun 1957, KPM menghentikan pelayarannya di Indonesia dikarenakan masalah politik pada saat itu antara Indonesia dan Belanda. Sebagaimana kita ketahui dalam rangka perjuangan Indonesia dalam merebut Irian Barat, KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) tidak luput dari pengambil alihan

<sup>65</sup> Buletin Melantjong di Indonesia.*opcit* hal. 65.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 66.



atau nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu sebagian dari kapal-kapal tersebut harus meninggalkan Indonesia

Dengan terjadinya nasionalisasi KPM, sejak 6 Desember 1957 otomatis perusahaan pelayaran Pelni harus melayani seluruh pelayaran yang ada di Indonesia. Pada saat itu Pelni sangat kesulitan dalam menyelenggarakan pelayaran nasional karena 70% pelayaran antar pulau dikuasai oleh KPM. Untuk mengatasi kekurangan ini, pemerintah menyewa kapal-kapal dari berbagai negara seperti Jepang dan Jerman Barat. Selain menyewa, pemerintah juga membeli langsung kapal-kapal dari Finlandia, Belanda, Jerman Barat, Italia dan Jepang.<sup>68</sup>

Di tahun 1958, kekurangan-kekurangan pelayaran angkutan barang dan penumpang antar pulau yang dialami oleh Pelni mulai dapat diatasi dengan datangnya kapal-kapal yang telah dibeli oleh pemerintah terutama dari Jepang. Dengan begitu Pelni sudah dapat memenuhi kebutuhan akan angkutan laut yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pelayaran yang dilayani oleh Pelni tidak hanya untuk wilayah Indonesia tetapi juga pelayaran internasional. Untuk itu Pelni juga membuka kantornya di luar negeri seperti di Penang (Malaysia), Singapura, Rangoon (Myanmar), Bangkok, Bussum (Belanda).<sup>69</sup>

Selain melayani angkutan barang dan penumpang Pelni juga ikut menyelenggarakan dan mempromosikan pariwisata di Indonesia. Dalam salah satu iklan Pelni bertuliskan *See Bali The World-Famous Tourist Resort, By MS Tampomas*<sup>70</sup> (Melihat Bali, tempat peristirahatan turis terkenal didunia, dengan MS Tampomas). Kapal MS Tampomas dari Pelni menyediakan pelayaran bagi turis yang ingin berkunjung atau berlibur ke pulau Bali. Setiap kamar atau kabin didalam kapal

<sup>68</sup> Biro Perantjang Negara. *Laporan Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960*. hal. 282.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 287.

<sup>70</sup> Lihat Lampiran 7.

tersedia juga pendingin ruangan, sehingga para turis tidak perlu takut kepanasan jika sedang dalam perjalanan.

Tarif untuk pelayaran nasional saat itu dibagi menjadi dua yaitu untuk penumpang kelas satu dan penumpang kelas dua. Rute pelayaran Pelni dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Belawan Deli misalnya, untuk kelas satu dikenakan biaya Rp.1526,- dan kelas dua Rp.1218,-.<sup>71</sup> Tarif itu termasuk yang termahal karena jarak antara Jakarta dan Medan cukup jauh. Pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan daerah-daerah wisata memang sudah dikategorikan cukup baik. Di Bali sendiri telah dibuka dua pelabuhan sebagai pintu masuk yaitu pelabuhan Benoa dan pelabuhan Buleleng.

Di era modern, penggunaan pesawat terbang untuk tujuan perjalanan wisata sangat memegang peranan yang sangat menentukan.<sup>72</sup> Kemajuan transportasi udara ini mulai berkembang setelah Perang Dunia II, karena teknologi pesawat terbang semakin modern. Seperti yang kita ketahui, penerbangan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan dikelola oleh maskapai penerbangan KNILM atau *Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij*. KNILM telah berhasil mempromosikan pariwisata serta melayani penerbangan para turis asing yang ingin berkunjung ke Hindia Belanda.

Sejarah penerbangan Indonesia sendiri baru dimulai setelah Indonesia merdeka. Pesawat pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia adalah pesawat kepresidenan RI-001 atau yang dikenal dengan “Seulawah”. Ide tentang pembelian pesawat terbang ini muncul pada pertengahan tahun 1948 dan berasal dari KSAU Komodor Udara S. Suryadarma yang dikenal dengan “*Dakota Fonds*” atau Dana

---

<sup>71</sup> *Bulletin Tourisme* edisi bulan April 1960.

<sup>72</sup> Oka. A. Yoeti.*op.cit.*, hal. 200.

Dakota.<sup>73</sup> Kemudian pelaksanaan pembelian ini diserahkan kepada Opsir Udara II Wiweko Supono dengan dibantu oleh Opsir Muda Udara III Nurtanio Pringgodisurjo. Di tahun yang sama Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan keliling Sumatra, Kepala Biro Propaganda Opsir Muda I J. Salatun ditugaskan agar ikut dengan presiden.

Pada tanggal 16 Juni 1948 bertempat di Aceh Hotel, Kutaraja, Presiden Soekarno dalam pidatonya yang pertama kali berhasil menarik simpati rakyat Sumatra khususnya Aceh, sehingga langsung terbentuk saat itu juga Panitia Dana Dakota di Aceh. Hanya dalam waktu dua hari, Panitia Dana Dakota yang diketuai oleh Djuned Jusuf dan Said Muhammad Alhabsji telah berhasil mengumpulkan uang sebesar 130.000 Straits Dollar dari masyarakat Aceh. Dengan terkumpulnya dana tersebut, AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) mengutus Opsir Udara II Wiweko Supono sebagai ketua misi pembelian untuk ke Singapura.<sup>74</sup>

Pada tanggal 1 Agustus 1948, Djuned Jusuf dan beberapa orang lainnya menyusul ke Singapura dengan membawa uang yang telah dikumpulkan dan 20 kg emas hasil pengumpulan Dana Dakota untuk diserahkan kepada Wiweko Supono. Pesawat Dakota yang dibeli adalah pesawat bekas dari Singapura yang memerlukan waktu 3 bulan untuk mendapatkan sebuah pesawat Dakota dalam keadaan yang baik dan layak terbang.<sup>75</sup> Untuk membalas jasa kepada masyarakat Aceh yang telah membantu pembelian pesawat maka pesawat tersebut diberi nama “Seulawah” yang berarti “Gunung Emas”.

Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer yang ke II tahun 1948, pesawat RI-001 sedang melakukan perawatan rutin di Calcutta, India. Akibat dari agresi tersebut, pesawat RI-001 putus kontak atau hubungan dengan pangkalan induk

---

<sup>73</sup> Arifin Hutabarat. *Padamu Negeri : Perjalanan Garuda Indonesia*. Jakarta: Ganesia PR. 1989. hal. 21.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>75</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 52.

karena diblokade oleh Belanda. Dengan tidak beroperasinya RI-001 justru akan merugikan, dan menambah biaya perawatan mesin, biaya parkir, dan biaya lainnya.<sup>76</sup> KSAU Komodor Udara S. Suryadarma akhirnya mengirim Wiweko Supono untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Opsir Udara II Wiweko Supono dan Opsir Udara III Sudarjono akhirnya mencapai kesepakatan untuk memanfaatkan pesawat RI-001 sebagai modal usaha penerbangan sipil untuk mendapatkan dana. Usaha ini didukung juga oleh Kepala Perwakilan RI di India Dr. Sudarsono.<sup>77</sup>

Keinginan Indonesia untuk mendirikan sebuah perusahaan maskapai penerbangan sipil ternyata tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah India. Pemerintah India tidak mengizinkan pendirian perusahaan penerbangan Indonesia dengan alasan karena di India telah ada maskapai penerbangan *Indian National Airways*. Pesawat milik Indonesia hanya diberikan izin sementara dan boleh beroperasi jika suatu saat penerbangan di India mengalami kekosongan.<sup>78</sup>

Dengan pertimbangan seperti itu maka tidak dapat dipastikan bahwa pesawat Indonesia mendapatkan penghasilan tetap. Untuk memecahkan masalah tersebut maka dicarilah alternatif negara lain untuk membuka penerbangan. Rencana untuk mendirikan perusahaan penerbangan itu didengar oleh Kepala Perwakilan RI di Birma (Myanmar), Marjunani. Pada bulan Januari 1949, akhirnya diperoleh jawaban dari pemerintah Birma. Pada saat itu pemerintah Birma sedang memerlukan angkutan udara untuk memadamkan pemberontakan<sup>79</sup> di dalam negerinya.

Pada tanggal 26 Januari 1949, pesawat Dakota milik RI oleh para awaknya yaitu Wiweko Supono dan Sudarjono diberikan nama "*Indonesian Airways*" di

---

<sup>76</sup> Arifin Hutabarat.*op.cit.*, hal 11.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 12.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>79</sup> Pemberontakan yang dimaksud adalah pemberontakan yang dilakukan oleh golongan ekstrim kiri *The White Flag People Volunteers Organization* dan *Yellow Flag People Volunteers Organization* serta golongan ekstrem kanan Suku Karen.

Rangoon, Birma. Baru pada tanggal 28 Januari 1949, secara hukum perusahaan ini resmi didirikan dan berkantor di 30 Thamwe Road, Rangoon.<sup>80</sup>

Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, Presiden Soekarno mendirikan sebuah perusahaan penerbangan *Garuda Indonesia Airways*. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan penerbangan Belanda KLM. Kerjasama ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar yang menyebabkan Republik Indonesia tergabung dalam Republik Indonesia Serikat dan berada di bawah Uni Indonesia-Belanda.

Garuda Indonesia Airways baru mulai beroperasi penuh pada tanggal 1 Maret 1950, dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah Republik Indonesia dari perusahaan penerbangan KLM. Pesawat-pesawat tersebut terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan delapan jenis pesawat PBY-Catalina Amphibi. Pada tahun 1954, suhu politik antara Indonesia dengan Belanda semakin memanas yang diakibatkan oleh masalah penyelesaian Irian Barat. Untuk itu pemerintah mengambil inisiatif untuk menasionalisasi GIA dari KLM. Pada 12 Juli 1954 melalui akte No. 30 Notaris Raden Meester Soewandi, KLM menyerahkan semua sahamnya kepada pemerintah RI.<sup>81</sup> Rute penerbangan GIA pada tahun 1955 hampir mencakup seluruh daerah di Indonesia kecuali Irian Barat karena saat itu masih dikuasai oleh Belanda.

Ketika GIA berbentuk NV<sup>82</sup>, biaya operasionalnya masih dibagi dua dengan KLM. Namun di tahun 1959 status hukum perusahaan GIA diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT), GIA mengelola dengan sendiri perusahaannya. Perkembangan Garuda Indonesia Airways sebagai perusahaan penerbangan satu-satunya setelah KLM pergi dari Indonesia sangat pesat. Mulai Maret 1961 pesawat-pesawat jenis Electra digunakan dalam operasi penerbangan untuk melayani rute

---

<sup>80</sup> Arifin Hutabarat.*op.cit.*, hal. 14.

<sup>81</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 54.

<sup>82</sup> *Naamloze Vennootschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham pemilikannya.

internasional. Tanggal 16 Maret 1962 telah dibuka dinas Penerbangan baru ke Hongkong dan tanggal 13 Maret 1962 dibuka juga penerbangan ke Tokyo. Sebelumnya GIA juga sudah melayani penerbangan internasional melalui rute Medan-Kuala Lumpur-Singapura dan Singapura-Medan-Singapura dengan pesawat-pesawat Convair (pesawat penumpang dengan jenis seperti jet).<sup>83</sup>

Untuk membantu memajukan pariwisata di Indonesia GIA juga membuka jalur Penerbangan Malam Jakarta-Denpasar PP (Pulang-Pergi) pada 1 November 1960. Pengguna dari penerbangan sebagian besar adalah wisatawan asing yang singgah ke Jakarta dan ingin menuju ke Bali. Dinas Penerbangan Malam ini beroperasi dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin dan Jumat.<sup>84</sup> Penerbangan ini menggunakan tipe pesawat Convair 440 Metropolitan. Penerbangan ini menjadi sangat penting karena tidak jarang wisatawan asing yang membatalkan kunjungannya hanya karena masalah kurangnya transportasi.<sup>85</sup>

Seperti halnya transportasi, perkembangan akomodasi di Indonesia pada awal kemerdekaan juga mengalami berbagai kesulitan. Banyak hotel-hotel yang beralih fungsi dan juga tidak jelas kepemilikannya. Pada awal bab ini telah dijelaskan bahwa pada awalnya pemerintah membentuk suatu badan yaitu HONET untuk mengambil alih hotel-hotel milik Belanda. Tidak terjadi perubahan yang berarti dalam perkembangan akomodasi di Indonesia pada tahun sampai akhir 1950. Hotel-hotel yang jumlahnya ratusan di jaman kolonial, hanya tersisa puluhan saja karena banyak yang tidak terurus.<sup>86</sup>

PT. Natour (National Hotel & Tourism) adalah salah satu perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola hotel-hotel yang dahulu dimiliki oleh Belanda. Beberapa hotel yang dikelola Natour memang merupakan hotel-hotel yang

---

<sup>83</sup> Arifin Hutabarat.*op.cit.*, hal. 34.

<sup>84</sup> Bulletin Tourisme edisi bulan Januari 1961. Hal. 4.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>86</sup> *Tourista*. Vol. 1 No. 2 edisi Februari. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961. hal. 34.

bertaraf Internasional. Di Jakarta, Natour mengelola Hotel Transaera di Jalan Medan Merdeka Timur 16. Hotel ini mempunyai 47 kamar dan menyediakan berbagai fasilitas seperti makanan eropa, *money changer*, bar, tarian setiap dua kali seminggu, dan juga pegawai yang bisa berbahasa Inggris dan Jerman.<sup>87</sup> Selain Hotel Transaera, di Jakarta juga ada hotel yang sangat terkenal di dunia internasional yaitu Hotel des Indes yang terletak di Jalan Gajah Mada 3-5. Hotel ini memiliki 200 kamar dan tarif per malam Rp. 259,60,- sampai Rp. 454,30,- pada tahun 1960.<sup>88</sup>

Fasilitas yang diberikan oleh Hotel des Indes adalah fasilitas bertaraf internasional seperti *ballroom* yang biasa digunakan untuk resepsi pernikahan dan juga ada ruang khusus bernama *The Troyka* untuk mengadakan konferensi. Tidak jarang pertemuan-pertemuan pejabat negara atau tamu negara diselenggarakan di hotel ini. Pegawainya juga bisa berbahasa Inggris, Perancis, dan Jerman. Ketika diambil alih oleh pemerintah di bawah Natour di tahun 1948, hotel ini berganti nama menjadi Hotel Duta Indonesia. Namun karena masih banyak orang yang bingung dengan nama barunya, nama Hotel des Indes masih dipakai hingga tahun 1950an.

Di luar Jakarta, Natour juga mengelola Hotel Simpang di Surabaya, Hotel Kuta di Bali, Garuda Hotel di Malioboro, Yogyakarta dan masih banyak hotel lainnya. Di tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Hotel yang mendapat kehormatan untuk menjamu para tamu negara di benua Asia dan Afrika itu adalah Hotel Savoy Homann. Hotel yang telah berdiri pada tahun 1871 juga merupakan salah satu hotel terbesar dan terbaik di Asia. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru tercatat juga pernah menginap di hotel ini.<sup>89</sup>

Ketika awal dibangun hotel ini masih terbuat dari bambu. Pada tahun 1880 pemiliknya mengubah bangunan ini menjadi permanen. Lalu pada tahun 1937, dilakukan renovasi dan pembangunan gedung baru yang diarsiteki oleh A.F. Albers

<sup>87</sup> *Bulletin Tourisme* edisi bulan Juni 1960. hal 14.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal 15.

<sup>89</sup> Oka. A. Yoeti.*op.cit.*, hal 303.

yang bercorak art deco<sup>90</sup>. Pada tahun 1953 hotel Savoy Homann dibeli oleh R.H.M Saddak, anggota DPR yang juga direktur dari “Saddak &Co” yang usahanya bergerak dibidang ekspor dan impor. Hotel ini memiliki 144 kamar dengan berbagai macam jenis dan ukuran. Tiap kamar dilengkapi oleh radio, telepon, air dingin dan air hangat. Fasilitas yang ada berupa toko souvenir, kolam renang, lapangan tennis dan berkuda.<sup>91</sup>

Pada kurun waktu 1945 sampai 1960 dapat disimpulkan bahwa tidak begitu terlihat penambahan jumlah hotel yang dibangun oleh pemerintah. Justru hotel-hotel peninggalan Belanda masih dijadikan andalan bagi para wisatawan untuk menginap. Karena faktor kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang mengetahui tentang manajemen hotel juga menyebabkan banyak hotel peninggalan Belanda tersebut bangkrut dan tutup. Baru di tahun 1960an pemerintah membangun beberapa hotel mewah yang bertaraf internasional seperti Hotel Indonesia di Jakarta, Hotel Bali Beach di Bali, Ambarrukmo Pallace di Jogjakarta dan Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu.<sup>92</sup>

Sarana pendukung lain yang tidak kalah penting dalam industri pariwisata adalah sektor konsumsi. Perkembangan sektor konsumsi terutama restoran di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya rumah makan dan restoran yang beragam di Indonesia. Pada tahun 1960an, rumah makan dan restoran di Indonesia dapat ditemukan berbagai macam jenis masakan, mulai dari masakan Eropa, Tionghoa, dan tentunya masakan Indonesia. Di Jakarta sendiri ada beberapa restoran yang cukup terkenal, yaitu restoran Ambassador yang terletak di samping Hotel Dharma Nirmala, Jalan Segara no. 14.<sup>93</sup> Restoran ini menyediakan masakan dan makanan ala Prancis. Selain itu masih banyak restoran lain di Jakarta yang menyediakan masakan Eropa

---

<sup>90</sup> Art Deco adalah sebuah gaya arsitektur percampuran antara gaya modern dan kuno.

<sup>91</sup> *Majalah Tourista* edisi Januari 1961.

<sup>92</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*,hal. 13.

<sup>93</sup> Simatupang, R.O. *Pedoman Tamasja Djakarta dan sekitarnya*. Djakarta: P.T. Keng Po. 1961. Hal. 59.



seperti restoran *Chez Mario* di Jalan Nusantara III/23, Restoran Seno di Jalan Pintu Air, restoran *Garden Hall* di Jalan Cikini Raya 72, Toko Oen di Jalan Nusantara 24 yang menjual aneka kue dan es krim, dan Restoran Airport di Kemayoran.<sup>94</sup>

Jika ingin menikmati masakan Tionghoa, para wisatawan dapat berkunjung ke daerah Glodok dan Pancoran. Disini merupakan pusat kuliner makanan Tionghoa, mulai dari yang sekelas restoran hingga yang berjualan menggunakan gerobak atau dipikul. Restoran-restoran yang sering dikunjungi oleh wisatawan antara lain restoran Kam Leng, Sin Kie Yun, Tai Lo Tian dan Tjong Piauw Njap. Makanan yang dijual pun sangat beragam seperti *wedang sekoteng* Tiongkok dengan isi lengkung, rujak juhi, rujak Shanghai, *pie-oh* (sop kura-kura), nasi tim, bebek tim (*sekba*), dan lain lain.<sup>95</sup>

Sedangkan untuk masakan Indonesia, dapat dijumpai hampir diseluruh wilayah Jakarta. Di jalan K.H. Wahid Hasyim 77C ada sebuah restoran besar yang menjual aneka makanan Indonesia yaitu Rumah Makan Geliga. Rumah makan Pagi Sore yang letaknya di samping jembatan Prapatan, Senen Raya juga menjual makanan Jawa dan makanan Padang.<sup>96</sup> Pusat makanan pinggir jalan yang terkenal pada saat itu di Jakarta adalah di Jalan Gereja Ayam, Senen. Makanan dari berbagai daerah dijual di sini seperti tahu pong Semarang, soto Kudus, soto Madura, gado-gado, laksa penganten Jakarta, sate kambing, sate ayam, rendang, ayam goreng Palinan, bubur jali, baso, siomay, bubur ayam, bubur kacang hijau, lumpia goreng, ketupat ayam panggang, dan lain lain.<sup>97</sup>

Selain Jakarta, kota lain yang menjadi daerah wisata seperti Malang juga banyak tersedia restoran dan rumah makan. Restoran dan rumah makan tersebut antara lain Toko Oen yang sama seperti di Jakarta menjual es krim dan kue, restoran

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 64.

Hok Lay di Jalan Djodipan 1 dan 10, Tjwie Mie Bromo di Jalan Modjopahit, Warung sate Sajang di Jalan Pertukangan 72, dan lain lain. Dapat juga ditemukan sebuah rumah makan yang menjual sate ayam madura yang bernama Warung Marhaen di belakang pasar Jalan Pegadaian. Selain itu, di sekitar hotel-hotel di Gang Semarang juga dapat ditemukan penjual Nasi Madura yaitu nasi yang terdiri dari ayam, daging sapi, telur rebus, sambel goreng, gudeg, dan serundeng.<sup>98</sup>

### 3.2. Pembentukan Yayasan Tourisme Indonesia

Dari perkembangan-perkembangan di sektor pariwisata yang terjadi di Indonesia pada tahun 1950an, terlihat bahwa kegiatan pariwisata nasional mulai tampak bangkit kembali. Walaupun terdapat kekurangan di beberapa hal seperti, keamanan wisatawan yang belum terjamin, hotel-hotel banyak yang belum memenuhi persyaratan internasional, peraturan-peraturan tentang devisa yang belum jelas, dan juga kurangnya sarana dan prasarana transportasi. Hal-hal tersebut pada saat itu masih menjadi rintangan dan tantangan dalam mengembangkan sektor kepariwisataan di Indonesia.

Dalam kesulitan itulah lahir sebuah organisasi *independen* atau swasta yang bernama Yayasan Tourisme Indonesia (YTI) di tahun 1955. Tidak diketahui secara tepat tanggal berapa organisasi Yayasan Tourisme Indonesia ini didirikan. Yang jelas hanya diketahui tahunnya saja dan tempat pendiriannya yaitu di *Grand Hotel du Pavillon*, Jakarta.<sup>99</sup> Kelahiran Yayasan Tourisme Indonesia merupakan sebuah harapan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sebuah industri yang dapat mendukung dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Menurut buku *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, saat itu sudah terbentuk sebuah kepengurusan organisasi ini, yaitu menjabat sebagai Ketua YTI adalah Prof. dr. R.

<sup>98</sup> Ananda. *Pedoman Tamasja Djawa Timur dan Bali*. Djakarta: P.T. Keng Po. 1961. Hal. 53.

<sup>99</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 57.

Hendarmin, wakil Ketua J. M. Laihad, Sekretaris M. S. Harris, dan Bendaharanya R. Hendarsin.

Selain pengurus harian yang disebutkan tadi, susunan pengurus juga ditambahkan lagi sebagai anggota pengurus yaitu Sri Boedjo dan R. Soekamto. Yayasan *Tourisme Indonesia* sebagai badan non-komersil memperoleh pendanaannya dari sumbangan-sumbangan para anggotanya dan juga dari para donatur atau sponsor.<sup>100</sup> Adapun anggota dari YTI sendiri berasal dari bermacam-macam profesi mulai dari Pejabat Negara, Dokter, Kepolisian, hingga swasta yang kebanyakan adalah para pemilik hotel. Dengan kerjasama antara pemerintah dan para pengusaha serta adanya promosi dan kampanye pariwisata saat itu membuat masyarakat semakin mengenal tentang pentingnya industri pariwisata.

Dalam waktu yang relatif cukup singkat Yayasan *Tourisme Indonesia* telah berhasil membuka cabang di beberapa daerah di Indonesia. Cabang tersebut antara lain berada di Bandung (Jawa Barat), Jakarta, Makassar (Sulawesi Selatan), dan Medan (Sumatera Utara). Selain daerah-daerah tersebut ada beberapa daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang juga mempunyai organisasi kepariwisataan dan akhirnya bergabung dengan YTI.

S. Brata dan seluruh korps wartawan ibukota yang juga merupakan salah satu anggota dari YTI saat itu berkampanye tentang “sadar wisata” karena pentingnya pariwisata untuk menambah devisa negara dan dia telah berhasil menciptakan iklim “demam *tourisme*” selama beberapa tahun kemudian.<sup>101</sup> YTI juga menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah sehingga peraturan-peraturan tentang keimigrasian dapat dipermudah atau disederhanakan. Dengan peraturan yang disederhanakan ini, para wisatawan terutama wisatawan asing dapat dengan mudah mengunjungi Indonesia. Selain itu yang paling penting adalah YTI berhasil menjalin

---

<sup>100</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 7.

<sup>101</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 60.

kerjasama dengan organisasi-organisasi kepariwisataan internasional dan menjadi anggota dari *Pasific Area Tourism Association* (PATA) dan *American Society of Travel Agents* (ASTA).<sup>102</sup> Dengan keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Yayasan Tourisme Indonesia seperti masuk dalam PATA dan ASTA, YTI memberanikan diri untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah agar YTI diakui sebagai satu-satunya badan yang mendapat tugas untuk membina dan meningkatkan kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Menteri Perhubungan saat itu, Suchyar Tedjasusmana bersedia memberikan pengakuan kepada YTI dengan syarat agar YTI menyelenggarakan kongres kepariwisataan yang bersifat nasional.

Untuk memenuhi persyaratan Menteri Perhubungan tersebut akhirnya pada tanggal 12-14 Januari 1957, Yayasan Tourisme Indonesia menyelenggarakan *Musyawarah Nasional Tourisme I* di Tugu, Bogor. Dalam rangka untuk menyiapkan dana musyawarah nasional tersebut pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 1956, YTI menyelenggarakan *Pekan Hiburan di Prinsen Park* (sekarang bernama Lokasari) Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Jakarta yang saat itu ditetapkan jatuh pada tanggal 22 Juni. Pekan Hiburan tersebut dibuka resmi oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan Wali Kota Soediro. Keuntungan dari acara tersebut akhirnya digunakan untuk menyelenggarakan *Musyawarah Nasional Tourisme I* 12-14 Januari 1957 di Tugu, Bogor.<sup>103</sup>

Dalam *Musyawarah Nasional Tourisme I* itu, dihadiri oleh utusan-utusan dari daerah, baik cabang-cabang YTI di daerah maupun organisasi-organisasi kepariwisataan non-YTI, yaitu:<sup>104</sup>

1. YTI Daerah Jakarta Raya : Ir. R. S. Danunagaro, Soepranoto, Sutojo
2. YTI Daerah Jawa Barat : Djuarsa, Adang Affandi, The Han Liem.
3. Bandung Permai : Abas Soeriadilaga, Ir. Soerodjo, Soeriadira

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 61.

4. Badan Tourisme Jawa Tengah : KRMT. Honggowongso, KRMT. Tirtodiningrat, Soejoso.
5. Lembaga Tourisme Jawa Timur: J. Mattalitti, Rifai Maliki, Soewarno.
6. Dewan Tourisme Bali : Sutedja, Gde Puger, Ny. Ida Mirah.
7. YTI Daerah Sulawesi Selatan : K. Makkawaru, dkk.
8. YTI Daerah Sumatera Utara : Djaidin Poerba, Napitupulu, H. Akip.

Disamping utusan-utusan tersebut, Biro Tourisme dari pemerintah di Kementerian Perhubungan juga mengirimkan utusannya yaitu, Soeganda dan Sjaifudin. Pemerintah juga mengirim Menteri Muda De Rosario dan Menteri Perdagangan Burhanuddin dalam Musyawarah Nasional Tourisme I tersebut.<sup>105</sup>

### 3.3. Pembentukan Dewan Tourisme Indonesia

Yayasan Tourisme Indonesia sebagai organisasi pertama yang memelopori perkembangan kepariwisataan Indonesia pada tanggal 12-14 Januari 1957 di Tugu, Puncak Bogor, menyelenggarakan kongres yang disebut dengan Musyawarah Nasional Tourisme I. Kongres tersebut diselenggarakan atas saran dari pemerintah yang menginginkan dibentuknya sebuah badan resmi yang di akui oleh pemerintah. Dalam musyawarah tersebut akhirnya disetujui untuk dibentuk sebuah badan yang bernama Dewan Tourisme Indonesia atau DTI. Pada tanggal 11 Februari 1957, DTI mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk mendapat pengesahan dan pengakuan dari pemerintah<sup>106</sup>

Surat DTI tersebut akhirnya dijawab oleh pemerintah dengan keluarnya Keputusan Menteri Perhubungan No. H2/2/21 Tanggal 8 April 1957 yang mengesahkan Dewan Tourisme Indonesia.<sup>107</sup> Dengan demikian DTI mendapat pengakuan sebagai satu-satunya badan sentral partikelir yang terdiri dari badan-

<sup>105</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 8.

<sup>106</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 8.

<sup>107</sup> Dalam salinan Keputusan Menteri Perhubungan No. H2/2/21 dalam buku *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia* terdapat kesalahan pengetikan yaitu tahun surat yang seharusnya adalah tahun 1957 diketik tahun 1967.

badan atau yayasan-yayasan di daerah untuk membantu dan mendampingi pemerintah dalam mengurus persoalan kepariwisataan. Selain itu, tugas DTI adalah untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang berkepentingan dalam industri pariwisata. Penggunaan nama Dewan Tourisme Indonesia sendiri adalah hasil dari kompromi yang tercapai antara Yayasan Tourisme Indonesia dengan organisasi-organisasi kepariwisataan non-YTI (Bandung Permai, Badan Tourisme Jawa Tengah, Lembaga Tourisme Jawa Timur dan Dewan Tourisme Bali). Dengan kompromi tersebut maka organisasi-organisasi itu melebur ke dalam DTI.<sup>108</sup>

Ketika DTI berdiri maka dipilihlah pengurus untuk menjalankan badan ini yaitu berupa Ketua Pleno dan Badan Pekerja. Ketua Pleno saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan Badan Pekerja, yaitu Sri Boedjo sebagai Ketua dan Sekretarisnya M. S. Harris. Pleno Dewan Tourisme Indonesia terdiri dari seluruh pendiri Yayasan Tourisme Indonesia, ditambah dengan tiga orang dari wakil tiap daerah provinsi.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Salinan *Surat Keputusan Menteri Perhubungan* No. H2/2/21 Djakarta, 8 April 1957. (Kodhyat, 1996: 127).

<sup>109</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 63.

## BAB IV

### Perkembangan Pariwisata di Indonesia 1957-1965

#### 4.1. Promosi Pariwisata Indonesia

Promosi dan pemasaran harus dilakukan demi menarik minat dunia internasional akan potensi Indonesia dalam sektor pariwisata. Potensi yang dimaksud, oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX terletak pada sejarah, seni budaya, dan komoditi hasil yang terkandung dalam bumi Indonesia serta keindahan alam tropis khatulistiwa dimana Indonesia terletak. Peluang ini dipergunakan oleh DTI untuk memprakarsai promosi dan pemasaran *tourisme* baik itu di dalam negeri dan di luar negeri. Sebagai organisasi pariwisata pertama yang di akui oleh pemerintah, DTI mempunyai tugas yang berat dalam mengembangkan kepariwisataan di Indonesia. Dalam tugasnya, DTI telah berhasil melakukan beberapa kegiatan-kegiatan penting seperti pelunakkan beberapa peraturan moneter, percepatan prosedur pemberian visa<sup>110</sup> wisatawan<sup>111</sup> asing di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri dan pengiriman siswa Indonesia ke luar negeri (Swiss) untuk mempelajari manajemen perhotelan dan pariwisata. Di tahun 1958 DTI berhasil menjadi anggota dari PATA (*Pacific Asia Travel Association*), IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*), dan ASTA (*American Society of Travel Agents*).

Ketika sudah masuk dalam beberapa keanggotaan badan-badan kepariwisataan internasional, Dewan *Tourisme* Indonesia disibukkan dengan kunjungan Presiden PATA Kolonel Clarence Young, Presiden IUOTO Vladimir

<sup>110</sup> *Visa* adalah catatan dalam paspor atau travel document lainnya yang diberikan oleh konsul atau pejabat pemerintah untuk menyatakan bahwa pemegang paspor yang bersangkutan telah diberikan jaminan oleh pejabat yang berwenang untuk memasuki atau masuk kembali ke negara yang bersangkutan. (Oka A Yoeti. *Tours & Travel Management*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2001. hal 99.)

<sup>111</sup> Wisatawan (*tourist*) adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam dengan maksud tujuan perjalanan untuk rekreasi, dagang, konferensi dan lain lain. Sedangkan Pelancong (*excursionist*) adalah pengunjung sementara yang tinggal di negara yang di kunjungi kurang dari 24 jam. Direktorat Jenderal Pariwisata. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. 1976. hal. 10-11.

Ankudunov, dan Presiden WATA (*World Association of Travel Agencies*) Daniel Dedina. Di samping itu DTI juga menerima kunjungan dari tim *research* dan survey PATA yang di wakili oleh Direktur PATA George Turner. Selain itu DTI juga berhasil menyusun landasan-landasan pokok pembangunan dan rencana kerja kepariwisataan yang kemudian diterima Dewan Perancang Nasional (Depernas).<sup>112</sup>

Di tahun 1957 terjadi ketegangan antara Indonesia dan Belanda karena masalah Irian Barat. Masalah ini membuat DTI harus terlibat dalam mengamankan perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak di bidang kepariwisataan seperti Nitour (*National & International Tourism Bureau*) dan Hotel Des Indes. DTI terpaksa segera mengambil alih perusahaan-perusahaan itu dengan alasan perusahaan tersebut akan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan maka, Penguasa Perang Pusat (Peperpu) memberikan izin khusus kepada DTI untuk membeli perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Selain Hotel Des Indes dan Nitour, DTI juga mendapat kepercayaan pemerintah untuk mengelola Hotel Majapahit (sebelumnya bernama *Grand Hotel du Pavillon*) dan gedung pertemuan *Societeit de Harmonie*. Gedung *Societeit de Harmonie* akhirnya di ganti namanya menjadi Wisma Nusantara (sekarang area parkir Gedung SesNeg).<sup>113</sup>

Dalam kesibukannya mengambalalih perusahaan-perusahaan Belanda, DTI mendapat persoalan yang cukup mengejutkan yaitu rencana kedatangan 5 buah kapal dari Amerika Serikat dan Inggris yang mengangkut 4.500 wisatawan ke Bali, secara mendadak dibatalkan oleh Amex Co, dan perusahaan perjalanan Thomas Cook.<sup>114</sup> Dua perusahaan itu adalah perusahaan terkenal dari Amerika Serikat dan Inggris yang bergerak di bidang perjalanan lintas negara. Alasan mereka membatalkan perjalanannya adalah karena situasi politik di Indonesia yang tidak stabil karena

---

<sup>112</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata. *op.cit.*, hal. 9.

<sup>113</sup> H. Kodhyat. *op.cit.*, hal. 64.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 65.



terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dan Belanda akibat dari masalah Irian Barat.<sup>115</sup>

Untuk menghadapi situasi tersebut maka, DTI segera mengambil tindakan untuk mendesak pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi para wisatawan yang akan datang dengan lima kapal tersebut. Akhirnya pemerintah setuju untuk memberikan jaminan dan lima kapal dari Amex Co dan Thomas Cook berhasil datang ke Indonesia. Lima kapal tersebut adalah Statendam, Kungsholm, Lurline, Caronia, dan Bergensjord. Sesuai dengan rencananya, setelah mengunjungi Bali mereka kembali lagi ke negara asalnya yaitu Amerika Serikat dan Inggris.<sup>116</sup>

Pada tanggal 12-14 Juni 1958, DTI menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke II di Tretes, Jawa Timur. Ada beberapa persoalan yang dibicarakan dalam musyawarah tersebut. Masalah itu antara lain tentang sumber keuangan untuk pembiayaan Dewan Tourisme Indonesia dan masalah pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dilakukan oleh DTI. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi pertanyaan dalam musyawarah karena bertentangan dengan rencana awal pendirian badan ini yang bersifat non-komersil.<sup>117</sup> Dengan penjelasan yang diberikan oleh para pengurus dari DTI para peserta musyawarah sepakat untuk menerima pengambilalihan tersebut dengan catatan harus segera diswastakan.<sup>118</sup>

Acara penutupan Musyawarah Nasional Tourisme ke II dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1958 di Gedung Pemuda (sekarang Balai Pemuda, Jl. Gubernur Suryo No. 15) Surabaya. Dalam acara itu dihadiri oleh Presiden Soekarno dan beberapa Menteri. Ketika sedang memberikan sambutan dalam penutupan Munas,

<sup>115</sup> Oka. A. Yoeti.*op.cit.*, hal. 43.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>117</sup> Salinan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT No. H2/2/21 Djakarta, 8 April 1957. (Kodhyat, 1996: 127).

<sup>118</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*, hal. 64.

Presiden Soekarno menanyakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Prijono mengenai terjemahan dari kata *tourisme* yang selama ini digunakan. Prof. Prijono memberikan definisi tentang *tourisme* yaitu, untuk perjalanan antar kota di dalam negeri dapat digunakan kata *dharmawisata*. Sedangkan untuk perjalanan antar negara digunakan kata *pariwisata*. Mulai saat itu pula Presiden Soekarno meresmikan penggunaan kata *pariwisata* sebagai pengganti kata *tourisme* yang berasal dari bahasa Belanda.<sup>119</sup>

**Tabel 1.** Jumlah Touris dari luar negeri yang datang ke Indonesia Periode 1957-1959

Kebangsaan	Jumlah Touris			Pengeluaran dalam US \$ **		
	1957	1958	1959	1957	1958	1959
Amerika Utara dan Amerika Latin	2.601	3.208	2.040*	728.280	898.240	571.200
Eropa	3.289	2.069	395	920.920	579.380	110.600
Asia dan Timur Tengah	809	1.160	92	226.520	324.800	25.760
Afrika	—	—	5	—	—	1.400
Australia	—	—	48	—	—	13.440
<b>Jumlah</b>	6.699	6.437	2.580	1.875.720	1.802.420	722.400

Keterangan : 1. \*) Jumlah turis dari Amerika Serikat 1963 orang, Kanada 26 orang dan Amerika Latin 51 orang.

2. \*\*) Diperkirakan tiap turis mengeluarkan rata-rata US\$ 280,- dalam 5 sampai 7 hari selama tinggal di Indonesia.

Sumber : Bulletin Tourisme bulan Juli 1960.

<sup>119</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata. *op.cit.*, hal. 9.

Dalam kurun waktu 1957 sampai 1959 terjadi penurunan jumlah turis atau wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Penurunan yang paling signifikan terjadi di tahun 1959, dimana jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia hanya berjumlah 2.850 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.437 orang. Wisatawan asing yang berasal dari Eropa adalah yang paling banyak menurun, dari yang berjumlah 2069 orang di tahun 1958 menjadi 395 di tahun 1959. Kondisi politik di Indonesia diperkirakan menjadi penyebab dari penurunan jumlah wisatawan asing ini, terutama wisatawan yang berasal dari negeri Belanda. Jumlah devisa<sup>120</sup> yang masuk ke kas negara saat itu juga mengalami penurunan. Lebih dari 50% penurunan itu terjadi di tahun 1959 dimana Indonesia hanya mendapatkan pemasukan sebesar US \$ 722.400,-.

Untuk lebih meningkatkan peranan Indonesia di dunia luar maupun di forum internasional dalam bidang kepariwisataan maka pada bulan November 1959, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Dewan Tourisme Indonesia berangkat ke Manila guna menghadiri Sidang Umum dari IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*). Dalam kesempatan tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengemukakan kepada para tokoh kepariwisataan internasional agar Indonesia diikutsertakan dalam kepariwisataan internasional.<sup>121</sup>

Setelah keberhasilan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke II, DTI berencana untuk mengadakan Munas ke 3 di bulan Juni 1959. Namun karena banyak kesibukan yang dilakukan oleh para pengurus maka diputuskan untuk menunda Munas itu sampai bulan April 1960. Penundaan juga disetujui oleh para Pengurus Pleno. Munas ke 3 yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun akhirnya

---

<sup>120</sup> *Devisa* adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Devisa terdiri atas valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia (seperti US Dollar (\$), Yen Jepang, Euro, Poundsterling Inggris), emas, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional, dan lainnya. ( Yoeti, 2001: 103)

<sup>121</sup> Oka. A. Yoeti.*op.cit.*, hal. 47.

tidak jadi dilaksanakan karena terjadi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>122</sup>

Keputusan penting mengenai status Dewan Tourisme Indonesia muncul setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT (Pos, Telegram, dan Telepon) No.H2/3/19 tertanggal 14 Maret 1960 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan Darat dan PTT G.P.H. Djatikusumo.<sup>123</sup> Dalam keputusan itu menegaskan bahwa Dewan Tourisme Indonesia ditunjuk sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan segala kegiatan pariwisata di Indonesia. Selain itu, Dewan Tourisme Indonesia juga harus melakukan penyusunan kembali atau reformasi. Badan ini bernama Dewan Tourisme Indonesia atau disingkat DTI dengan terjemahan dalam bahasa Inggris *Indonesia Council for Tourisme*. Tugasnya sendiri adalah untuk membantu dan mendampingi Pemerintah dalam penyelenggaraan kebijaksanaan dalam memajukan Tourisme yang seluas-luasnya.<sup>124</sup>

DTI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat langsung dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Darat dan PTT. Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu masih dipercaya oleh G.P.H Djatikusumo sebagai Ketua DTI. Untuk menjalankan tugasnya, Ketua DTI dibantu oleh Biro Eksekutif. Biro ini dipimpin oleh seorang Kepala yang dipilih langsung oleh Ketua DTI, dan saat itu dipilih Sri Budojo sebagai Kepala Biro Eksekutif. Keanggotaan DTI terbagi menjadi enam yaitu Anggota Kehormatan, Anggota Ex-Officio, Anggota Perusahaan, Anggota Pelengkap, Anggota Peserta dan Anggota Peserta Istimewa.<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 67.

<sup>123</sup> Salinan *Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT* No.H2/3/19 tanggal 14 Maret 1960. (Kodhyat, 1996: 131-137)

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Bulletin Tourisme edisi Oktober 1960. hal. 10.

Anggota Kehormatan adalah anggota atau orang yang di tunjuk oleh Ketua DTI dengan persetujuan Menteri Perhubungan, mantan Anggota Kehormatan DTI, mantan Anggota Pleno DTI. Anggota Ex-Officio adalah pejabat-pejabat Pemerintah yang jabatannya bersangkutan dengan industri pariwisata di antaranya pejabat dari Djawatan Penerbangan Sipil, Djawatan Pelayaran Niaga, Djawatan Kebudayaan, Direktur Djendral Pekerjaan Umum dan Tenaga, Sekjen Departemen Penerbangan, Djawatan Harga dan lain-lain.<sup>126</sup> Sedangkan untuk Anggota Perusahaan adalah perusahaan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan turisme yaitu Garuda Indonesia Airways, PELNI, dan Nitour. Untuk Anggota Pelengkap, Anggota Peserta, dan Anggota Peserta Istimewa adalah merupakan wakil-wakil, badan-badan perusahaan atau perseorangan yang dianggap ada sangkut pautnya dalam usaha memajukan industri pariwisata di Indonesia. Dewan Tourisme Indonesia mengadakan sidang atau Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun. Musyawarah Nasional merupakan forum konsultasi dalam usaha memajukan Tourisme di Indonesia. Dalam Musyawarah ini juga dipilih anggota Komite Konsultatif. Komite Konsultatif bertugas untuk memberi nasehat kepada Ketua Dewan Tourisme Indonesia.

Ketika DTI baru didirikan tahun 1957, pembiayaan untuk menjalankan tugas-tugas memajukan pariwisata berasal dari sumbangan-sumbangan swasta dan pihak-pihak terkait. Namun setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.H2/3/19, 14 Maret 1960, sumber pembiayaan DTI berasal dari Departemen Perhubungan Darat dan PTT. Dengan adanya perhatian dari pemerintah ini, maka DTI akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan tidak akan kesulitan dana lagi. Selain pembiayaan dari pemerintah, DTI juga masih membuka sumbangan dari pihak-pihak luar dan juga iuran dari perusahaan yang terkait dalam industri pariwisata.<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Salinan *Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT. op.cit.*, hal 134.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Untuk membantu DTI dalam bekerja, maka dibentuk Dewan Tourisme Daerah yang ketuanya di tunjuk langsung oleh Ketua DTI. Dewan Tourisme Daerah ini berada langsung dibawah DTI Pusat. Sampai akhir tahun 1960 sudah terbentuk sembilan Dewan Tourisme Daerah yaitu, Dewan Tourisme Jakarta-Raya, Dewan Tourisme Jawa Barat, Dewan Tourisme Jawa Tengah, Dewan Tourisme Jogjakarta, Dewan Tourisme Jawa Timur, Dewan Tourisme Bali, Dewan Tourisme Sumatera Utara, Dewan Tourisme Sumatera Selatan dan Dewan Tourisme Sulawesi Selatan-Tenggara. Jabatan Dewan Tourisme Daerah tersebut diketuai oleh para Gubernur Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.<sup>128</sup>

Perkembangan pariwisata di Indonesia di awal tahun 1960, tidak bisa terlepas dari kondisi politik yang terjadi pada saat itu. Di masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965, segala hal harus berkaitan dengan perjuangan Revolusi Indonesia.<sup>129</sup> Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem politik dan pemerintahan Indonesia menjadi serba terpimpin, baik itu berupa demokrasi terpimpin dan di bidang perekonomian menjadi ekonomi terpimpin. Dalam situasi yang seperti itu, pemerintah mulai masuk ke semua sektor kehidupan masyarakat tidak terkecuali di bidang pariwisata. Seluruh kegiatan kepariwisataan yang dianggap pemerintah penting dan harus berada ditangan pemerintah. Dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT No.H2/3/19 tanggal 14 Maret 1960 secara langsung membuat Dewan Tourisme Indonesia yang tadinya bersifat independen sekarang menjadi milik pemerintah. Begitu pula dengan *travel bureau*<sup>130</sup> atau biro perjalanan, setelah keluarnya SK Menteri Perhubungan Darat dan PTT tanggal 14 Maret 1960, Nitour ditetapkan menjadi salah satu biro perjalanan yang memonopoli kepariwisataan di

<sup>128</sup> Bulletin Tourisme.*op.cit.*hal 10.

<sup>129</sup> M.C.Ricklefs.*op.cit.*hal. 402.

<sup>130</sup> *Travel Bureau, Travel Agency atau Tour Operator* adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang, termasuk kelengkapan dari suatu tempat ke tempat lain baik di dalam negeri, ke luar negeri atau dalam negeri itu sendiri. ( Yoeti, 1990: 29)

Indonesia. Monopoli yang dilakukan oleh pemerintah ini akhirnya semakin membuat lesu pengusaha swasta di bidang kepariwisataan.

Bagi Indonesia, pariwisata tidak hanya sebagai sumber penerimaan devisa, tetapi juga berarti mempromosikan niat baik, persahabatan dan saling pengertian antar bangsa-bangsa di dunia. Menteri Perhubungan Darat dan PTT G.P.H Djatikusumo dalam sebuah kesempatan menyampaikan “turis asing yang akan berkunjung ke Indonesia akan diberikan karpet merah karena mereka adalah tamu kehormatan”, yang usulannya kemudian didukung juga oleh Ketua DTI Sri Sultan Hamengkubuwono IX.<sup>131</sup>

Sejak tahun 1960, Pemerintah berupaya untuk menyederhanakan prosedur agar para wisatawan asing semakin mudah datang ke Indonesia. Visa turis dapat diperoleh di setiap kantor konsulat di luar negeri hanya dalam waktu beberapa hari saja. Sebelumnya, jika ada turis asing yang ingin berkunjung ke Indonesia diperlukan waktu seminggu bahkan sampai sebulan untuk mengurus visa. Di Amerika Serikat visa bahkan bisa dikeluarkan dalam waktu sehari setelah pengajuan. Visa turis ini diberikan untuk jangka waktu enam puluh hari, dan dapat diperpanjang satu bulan lagi jika sudah tiba di Indonesia.<sup>132</sup>

Pemegang visa turis Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan moneter Indonesia. Pertukaran mata uang asing yang di atas dari harga biasanya, dari Rp. 135,- per U.S \$ 1,- menjadi Rp 180,- per US \$ 1,-.<sup>133</sup> Semua transaksi penukaran mata uang asing harus melalui bank dan *money changer* (tempat penukaran valuta asing atau mata uang asing) yang berlisensi resmi. Turis asing yang ingin kembali ke

---

<sup>131</sup> Departemen Luar Negeri Indonesia. *Indonesia*. 1961.hal. 92.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.* hal. 93.

negara asalnya dapat menukarkan kembali uang rupiah mereka maksimal dengan US\$ 50,- asalkan mereka sudah menghabiskan US\$ 10,- per hari di Indonesia.<sup>134</sup>

Sebagai bagian dari DTI, Nitour juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan promosi pariwisata. Selama bulan Februari sampai Maret 1960 Nitour mendapatkan kunjungan dari berbagai biro pariwisata dunia seperti SITA (*Students International Travel Association*) World Travel, Schilling Around The World Tour, American Express Company, Verne Tour dari Meksiko, Travel World Tour dan Cahill Edmund Travel Service. Di antara biro pariwisata itu, SITA mengirim paling banyak turisnya ke Indonesia yaitu sebanyak lima kapal.<sup>135</sup>

Pada tanggal 22-26 Februari 1960, Konferensi PATA<sup>136</sup> ke IX diselenggarakan di Christchurch, Selandia Baru. Konferensi ini dibuka oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Walter Nash dan Sir Leonard Isitt selaku Presiden PATA. Indonesia dalam konferensi tersebut mengirimkan dua orang delegasinya yaitu Sri Budojo selaku Wakil Ketua Dewan Tourisme Indonesia dan R. M. Suparto selaku Staf Hubungan Luar Negeri Dewan Tourisme Indonesia. Dalam konferensi tersebut dibicarakan tentang rencana kerja yang akan dilakukan PATA ke depan yaitu untuk menyamakan atau menyelaraskan tingkat pelayanan hotel untuk turis dan menyempurnakan program kerja di bidang publikasi dan kampanye iklan. Konferensi ini juga memilih Presiden PATA yang baru, yaitu Gubernur Quinn dari Negara Bagian Hawaii, Amerika Serikat untuk periode 1960-1961. Hasil lainnya adalah terpilihnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai anggota *Board of Director*

---

<sup>134</sup> *Ibid.* hal. 94.

<sup>135</sup> Bulletin Tourisme edisi April 1960. hal. 15.

<sup>136</sup> PATA atau *Pacific Asia Travel Association* didirikan pada tahun 1951 di Hawaii. Asosiasi ini bersifat tidak mencari keuntungan (non-profit). PATA bertujuan untuk mempromosikan seluruh daerah kawasan Asia Pasifik dan Amerika Utara sebagai daerah wisata yang menarik untuk dikunjungi. A.J. Muljadi. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta Rajawali Pers. 2009. hal. 198-199.



PATA untuk masa kerja 1960-1963. Tugas dari *Board of Director* sendiri adalah untuk menentukan arah lalu lintas turisme ke daerah-daerah Pasifik.<sup>137</sup>

Kurangnya tenaga yang ahli di bidang pariwisata juga yang menyebabkan Indonesia masih ketinggalan dengan negara-negara lain di Asia seperti Thailand, Singapura, Hong Kong dan Jepang. Untuk mengatasi hal itu, DTI berusaha mengirimkan pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar mengenai perhotelan dan turisme di akhir tahun 1960. Sebanyak 15 pelajar-pelajar Indonesia di kirim ke Jepang dan akan belajar tentang manajemen perhotelan dan turisme selama dua tahun. Selain ke Jepang DTI juga pernah mengirim pelajar-pelajar Indonesia ke Swiss di tahun 1959 untuk mempelajari tentang perhotelan.<sup>138</sup>

Selain bekerja sama dengan organisasi pariwisata regional, DTI juga menjalin kerjasama dengan organisasi atau badan pariwisata negara lain. Kerja sama itu antara lain dengan *Intourist Moskow*. Pada bulan Juli 1960 Presiden Intourist datang ke Jakarta untuk membicarakan tentang pertukaran turis dari Rusia ke Indonesia dan sebaliknya. Dalam pembicaraan tersebut Dewan Tourisme Indonesia diwakili oleh Sri Budojo sedangkan dari pihak *Intourist Moskow* diwakili oleh Ankudinov. Ankudinov selain menjabat sebagai Presiden *Intourist Moskow* juga merangkap menjadi Wakil Presiden IUOTO.<sup>139</sup> Masih di bulan Juli 1960, kapal 'Michail Khalinin' datang ke Jakarta dengan membawa 286 turis dari Uni Soviet yang sedang melakukan perjalanan mengelilingi Asia dan Timur Tengah.<sup>140</sup>

Setelah Rusia, Singapura dan Filipina juga melakukan kunjungannya ke Indonesia. Mr. Peralta dari *Singapore Tourist Association* beserta seorang wartawan dari Nang Yang Post tiba di Jakarta tanggal 11 Agustus 1960. Ketika berada di Jakarta Mr. Peralta menginap di Hotel Des Indes dan menjadi tamu Dewan Tourisme

<sup>137</sup> Bulletin Tourisme.*op.cit.*,hal 17.

<sup>138</sup> Bulletin Tourisme edisi bulan Mei 1960. hal. 7.

<sup>139</sup> Bulletin Tourisme edisi bulan Juli 1960. hal. 9.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hal. 7.

Indonesia. Dalam kunjungannya yang hanya seminggu, Mr. Peralta sempat mengunjungi Pulau Bali, Gilimanuk, Banyuwangi dan Surabaya.<sup>141</sup>

Pada tanggal 17 Agustus 1960, Mr. Modesto Farolan dari *Commissioner for Tourism Filipina* yang juga Presiden IUOTO datang ke Indonesia. Kedatangannya tersebut atas undangan dari ketua DTI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pertemuan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Mr. Modesto Farolan adalah untuk membicarakan dan meninjau persiapan Indonesia berkaitan dengan publikasi dan propaganda “*Visit The Orient Year 1961*”.<sup>142</sup> Sebelumnya, Sri Budojo sebagai Kepala Biro Eksekutif DTI pada 2 Juli 1960 telah di undang ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi IUOTO. Konferensi itu berlangsung tanggal 5-7 Juli 1960 yang dihadiri oleh sembilan negara yaitu Filipina, Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia), Muang Thai (Thailand), Vietnam Selatan, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Jepang dan Indonesia.<sup>143</sup> Tujuan dari Konferensi ini adalah *combine publicity campaign* atau kampanye publikasi bersama dalam rangka menyambut “*Visit The Orient Year 1961*”.

Promosi yang dilakukan oleh DTI tidak hanya melalui badan-badan atau organisasi kepariwisataan. Salah satu promosi yang cukup efektif adalah melalui media film. DTI bekerja sama dengan perusahaan film Amerika, *Phil Walker Film Production* untuk membuat film pariwisata. Penandatanganan kontrak pembuatan film turisme itu dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1960 di Wisma Nusantara. Pihak DTI diwakili oleh Sri Budojo, sebagai Kepala Biro Eksekutif oleh Phil Warker sendiri.<sup>144</sup> Pengambilan gambar tersebut dilakukan di Pulau Bali dan dilanjutkan di Pulau Sumatera ditemani oleh dua anggota staff Dewan Tourisme Indonesia. Selain

<sup>141</sup> Warta Pariwisata edisi bulan September 1960. hal. 13.

<sup>142</sup> “*Visit The Orient Year*” merupakan program yang dibuat oleh IUOTO dalam rangka memajukan pariwisata di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur.

<sup>143</sup> Warta Pariwisata edisi bulan Agustus 1960. hal. 8.

<sup>144</sup> Warta Pariwisata edisi bulan September 1960. hal. 15.

Phil Walker, di bulan Agustus 1960, Dewan Tourisme Indonesia juga kedatangan rombongan televisi dari NBC (*National Broadcasting Company*) Amerika Serikat. Kedatangan NBC adalah untuk melakukan pengambilan gambar dalam acara televisi mereka yaitu *Dinah Shore Chevy Show*. Selama di Indonesia, rombongan ini akan mengambil gambar di Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya dan Bali dengan didampingi oleh Kepala Biro Publikasi DTI, R.M. Suparto.<sup>145</sup>

Bertepatan dengan ulang tahun PATA yang ke 10, diselenggarakan Konferensi tahunan PATA pada bulan 10-15 Januari 1961 di Honolulu, Hawaii. Agar Indonesia semakin di percaya oleh negara-negara lain sebagai negara yang mampu menyelenggarakan pariwisata maka DTI berencana untuk mengadakan *Indonesian Floating Fair* atau pameran terapung.<sup>146</sup> Berkat dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Presiden Soekarno akhirnya pameran terapung tersebut berhasil dilaksanakan. Kapal yang digunakan adalah kapal ‘Tampomas’ milik P.T. Pelni yang membawa oleh seniman-seniman dan penari dari Bali, Jawa, dan daerah lainnya. Sebagai duta keliling Indonesia, kapal Tampomas ini akan berkeliling untuk mengunjungi Singapura, Manila (Filipina), Hong-Kong, Bangkok (Tailand), Yokohama, Tokyo, Kobe, Osaka (Jepang), dan Honolulu (Hawaii).<sup>147</sup>

Presiden Soekarno melepas rombongan *Indonesian Floating Fair* di Pelabuhan Tanjung Priok, dengan mengemban misi ‘*Indonesia is the most enchanting tourist destination of the Pacific*’ (Indonesia adalah tujuan wisata yang paling mempesona di Pasifik) dan juga membawa produk-produk komoditi pertanian terbaik untuk diekspor seperti kopi, teh, karet, kina, cengkeh dan juga pernik-pernik souvenirs kerajinan tangan dari Jepara, Jogjakarta dan Bali.<sup>148</sup> Perangkat kebudayaan juga digelar sebagai penghibur bagi pengunjung dan hadirin di dalam kapal

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>146</sup> *Tourista*. Vol. 1 No. 3 edisi Maret. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961. hal. 3.

<sup>147</sup> Nyoman S. Pendit. *Bung Karno dan Pariwisata*. Sinar Harapan. Sabtu, 1 September 2001. hal. 2.

<sup>148</sup> *Warta Pariwisata* edisi bulan Oktober 1960. hal. 8.

*Indonesian Floating Fair 1961* atau di gedung teater dalam tiap kota yang disinggahi selama pelayaran sampai ke Honolulu, Hawaii, dengan berbagai tari-tarian, nyanyi, lagu musik klasik, kontemporer dan modern dalam pentas.<sup>149</sup>

Di Honolulu para rombongan *Indonesian Floating Fair 1961* yang jumlahnya hampir 200 orang tersebut menggelar *Gala-Show* untuk pembukaan *The 10th Annual Conference of PATA* yang dipimpin oleh Ibu Sutedja, yang Wakilnya Gembel Soedijono dan Sekjenya Nyoman S Pendit. Penampilan *Indonesian Floating Fair 1961* ini sangat memukau hadirin sidang *10th Annual Conference PATA* Honolulu, Hawaii, sehingga dengan kesepakatan bersama para peserta Konferensi PATA Honolulu, Hawaii ini memutuskan bahwa Konferensi PATA ke 12 akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia tahun 1963 setelah Konferensi PATA ke 11 di Hong Kong.<sup>150</sup>

Sejak Dewan Tourisme Indonesia berdiri, masalah-masalah tentang kepariwisataan di Indonesia memang sangat rumit seperti kurangnya infrastruktur dan tenaga ahli dalam bidang perhotelan dan pariwisata. Untuk membangun industri kepariwisataan di Indonesia, DTI mengalami banyak kendala yang dihadapi. Masalah keamanan di daerah juga menjadi faktor mengapa pariwisata Indonesia masih sulit untuk dikembangkan di tahun akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960. Pemberontakan PRRI/Permesta<sup>151</sup> di daerah Sumatera dan Sulawesi mengakibatkan daerah-daerah yang berpotensi untuk dikunjungi wisatawan semakin ditinggalkan. Pertentangan antara Pusat dan Daerah ini harus diselesaikan melalui jalan operasi militer sehingga

<sup>149</sup> Warta Pariwisata edisi bulan Januari 1961. hal. 7.

<sup>150</sup> Nyoman S. Pendit. *loc.cit.* hal. 4.

<sup>151</sup> Pemberontakan PRRI/Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta adalah pemberontakan yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Pemberontakan tersebut tersebar di wilayah Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon dan di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual. Ricklefs, 2005. hal 396.

daerah-daerah tersebut tidak aman untuk dikunjungi baik itu wisatawan lokal maupun asing.

Periode tahun 1960an merupakan masa-masa suram bagi pengusaha-pengusaha swasta di bidang pariwisata. Monopoli yang diberikan Nitour mengakibatkan *travel bureau* swasta lain seperti Intratour dan Intrabu tidak dapat bersaing. Ditambah lagi dengan adanya ‘Peraturan Pembatasan Perusahaan Tourisme’ yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 1960 oleh Menteri Perhubungan Darat dan PTT. Para pengusaha dibidang *travel bureau*, *travel agencies* dan perusahaan sejenisnya, harus atau wajib memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Darat jika tidak perusahaan tersebut dapat dibubarkan.<sup>152</sup>

Pemerintah saat itu melalui Jawatan Pengendalian Harga juga menentukan tarif hotel agar pihak hotel tidak memasang tarif melebihi ketentuan pemerintah. Akibatnya banyak hotel yang terbengkalai dan tidak terpelihara karena penerimaan hotel tidak seimbang dengan biaya operasional. Akhirnya banyak pemilik hotel yang menerima tamu dari keluarganya sendiri dan tinggal untuk jangka waktu yang sangat lama, sehingga fungsi hotel berubah menjadi pemondokan. Dengan hal-hal seperti itu kualitas pelayanan perhotelan menurun secara drastis dan profesionalisme dalam pengelolaan hotel semakin ditinggalkan. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang perhotelan dan pariwisata juga menyebabkan kepariwisataan di Indonesia agak sulit berkembang. Hotel-hotel yang telah berdiri sejak lama juga masih kurang memiliki pekerja-pekerja yang mengerti bagaimana cara untuk melayani tamu atau wisatawan.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Salinan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT No. H2/6/11 Tanggal 18 Mei 1960.

<sup>153</sup> *Tourista*. Vol. 1 No.1 edisi Januari. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961. hal. 40.

#### 4.2. Perubahan nama menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (Depari)

Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada orang asing yang datang ke Indonesia, maka Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden No. 65 tanggal 16 Februari 1961 tentang pembentukan Panitia Penampung Orang Asing yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.<sup>154</sup> Tugas dari panitia tersebut yaitu untuk mempermudah masuknya orang asing yang akan mengunjungi dan mengenal Indonesia. Selain itu badan ini juga menentukan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

Setelah tertunda selama tiga tahun karena kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh DTI, Musyawarah Nasional ke III akhirnya berhasil diselenggarakan pada tanggal 3-4 Agustus 1961 di Jakarta.<sup>155</sup> Pada Musyawarah Nasional ke II, oleh Presiden Soekarno pernah diusulkan untuk mengganti kata *tourisme* yang berasal dari bahasa Belanda menjadi *pariwisata* yang berasal dari bahasa sansekerta. Maka dalam Musyawarah Nasional ke III akhirnya disepakati bersama untuk mengganti nama *Dewan Tourisme Indonesia* menjadi *Dewan Pariwisata Indonesia* atau yang disingkat dengan Depari.<sup>156</sup>

Kesepakatan lainnya adalah semua anggota DTI/Depari mendukung penuh kebijaksanaan Ketua Depari dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan seluruh kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Seluruh anggota juga menyetujui dilaksanakannya Konferensi PATA yang ke 12 tahun 1963 di Indonesia. Kegiatan yang harus dilakukan Depari dalam usaha memajukan kepariwisataan di Indonesia adalah dengan perluasan cabang-cabang biro perjalanan, perbaikan fasilitas, perluasan lapangan terbang Kemayoran, perluasan jaringan serta penambahan frekuensi penerbangan dalam dan luar negeri.<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> Yoeti.*op.cit.*, hal 47.

<sup>155</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal 10.

<sup>156</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 70.

<sup>157</sup> *Ibid.*, hal. 71.

Struktur badan ini juga tidak banyak berubah, sebagai Ketua Departemen masih dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan di bawah Departemen Perhubungan Darat dan PTP.

Perkembangan Pariwisata di Indonesia mulai memperlihatkan kemajuan di awal tahun 1960an. Di tahun 1961, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sekitar 11.609 orang dan berhasil melampaui target sekitar 16% dari yang ditargetkan 10.000 orang.<sup>158</sup> Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Departemen semakin berat dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *event-event* atau peristiwa penting seperti *event* olahraga Asian Games<sup>159</sup> ke IV tahun 1962 di Jakarta dan Konferensi PATA tahun 1963.

Untuk menyambut *event* Asian Games ke IV di Jakarta, pemerintah Indonesia membangun sebuah hotel mewah yang bertaraf internasional yaitu Hotel Indonesia. Bangunan ini dirancang oleh arsitek asal Amerika Serikat, Abel Sorensen dan istrinya, Wendy. Desain bangunan dibuat seperti huruf T sehingga seluruh kamar dapat melihat pemandangan luas Ibu Kota. Bangunan utama berlantai 14 dan tinggi 50 meter lengkap dengan restoran dan pendingin ruangan. Slogan dari Hotel Indonesia ini sendiri adalah “*A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together*” yang mencerminkan semangat bangsa Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.<sup>160</sup> Hotel ini secara resmi dibuka pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden Soekarno dan berada di bawah sebuah perusahaan milih pemerintah

<sup>158</sup> Departemen Luar Negeri Indonesia. *Indonesia*. 1962. hal. 94.

<sup>159</sup> Bentuk pariwisata menurut motivasi ada lima, yaitu Pariwisata Rekreasi, Pariwisata Perjalanan, Pariwisata Budaya, Pariwisata Konvensi dan Pariwisata Olahraga (*sport tourism*). *Asian Games* termasuk dalam *Sport Tourism* atau *Big Sport Events* yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar yang menarik perhatian baik untuk olahragawan sendiri maupun supporter (penggemarnya). Muljadi. *op.cit.* hal. 133-134.

<sup>160</sup> Departemen Luar Negeri Indonesia. *op.cit.* hal. 82.

yaitu P.T. Hotel Indonesia.<sup>161</sup> Hotel Indonesia juga merupakan salah satu bangunan yang dana pembangunannya di dapat melalui dana *Pampasan Perang Jepang*.<sup>162</sup>

Selain Hotel Indonesia, pemerintah juga membangun penginapan atau akomodasi untuk para atlet dan tamu penting lainnya. *Wisma Aneka I* adalah sebuah bangunan dua lantai dan 196 unit kamar, masing-masing kamar terdiri dari 3 tempat tidur yang diperuntukkan bagi para atlet. *Wisma Aneka II* juga dibuat untuk akomodasi para atlet yang terdiri dari 154 unit kamar. Bagi para atlet putri disediakan *Wisma Dormitory* yang terdiri dari 160 unit kamar tidur. *International Guest House* disediakan khusus bagi tamu-tamu undangan Asian Games IV yaitu *Asian Games Federation (AGF)*, *International Olympic Committee (IOC)*, *International Sport Federation (ISF)* dengan kapasitas 64 kamar tidur.<sup>163</sup>

Keterlibatan Depari dalam Asian Games terjadi sejak terbentuknya Panitia Kerja Pertama atau *Organizing Committee* Asian Games IV. Dewan Pimpinan Asian Games memutuskan untuk membentuk sebuah Panitia Kerja Pertama yang diketuai Sri Budojo dari DTI/Depari. Dipilihnya Sri Budojo sebagai ketua Panitia Kerja adalah karena beliau sudah banyak memiliki pengalaman dalam masalah turisme dan perhotelan. Mengingat para pengunjung yang datang ke Indonesia tidak hanya terdiri dari olahragawan saja, melainkan banyak juga wisatawan asing yang ingin menyaksikan peristiwa olahraga ini. Setelah beberapa kali rapat Panitia Kerja Pertama ini telah memetakan beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah secepat mungkin. Masalah pertama adalah prosedur untuk masuk ke Indonesia yang harus dipermudah lalu mempertimbangkan untuk memasukkan mata

---

<sup>161</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*, hal. 11.

<sup>162</sup> Pampasan Perang adalah pembayaran yang secara paksa ditarik oleh negeri pemenang perang kepada negeri yang kalah perang sebagai ganti atas kerugian material. Hassan Shadily. *Ensiklopedi Indonesia*. Ichtar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects. Jakarta, 1984. hal. 2529

<sup>163</sup> Julius Pour. *Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno*. Jakarta : Grasindo. 2004. hal. 105-106.



uang asing terutama US Dolar.<sup>164</sup> Hotel-hotel yang dalam kondisi rusak atau kurang baik untuk segera di renovasi dan menambahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti restoran, binatu, bar dan lain-lain. Tugas DTI/Depari ini sendiri adalah mendampingi pemerintah secara langsung dalam pembangunan-pembangunan sarana akomodasi perhotelan dan juga pelatihan-pelatihan terhadap para pekerja perhotelan dalam *service* atau pelayanan tamu.<sup>165</sup>

Berkat kerja sama dari semua pihak, Asian Games ke IV di Jakarta berhasil terselenggara dari tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962. Pembukaan Asian Games ke IV di buka langsung oleh Presiden Soekarno di Gelanggang Olahraga Bung Karno. Acara tersebut berlangsung sangat meriah dengan hadirnya 1.460 atlet yang datang dari 16 negara-negara di Asia dan disaksikan oleh 110.000 penonton. Pesta olahraga se-Asia sebenarnya sempat menuai protes dari ketua *Asian Games Federation* (AGF) G. D. Sondhi karena Indonesia menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan.<sup>166</sup> Indonesia beralasan bahwa penolakan dilakukan sebagai bentuk solidaritas negara-negara Arab dan Republik Rakyat Cina.<sup>167</sup> Terlepas dari semua itu, Indonesia secara langsung memperlihatkan kepada dunia bahwa telah menjadi tuan rumah yang baik dalam menyelenggarakan suatu pesta olahraga.

Setelah tugas dari Asian Games IV selesai dilaksanakan, Depari segera mempersiapkan peristiwa yang tidak kalah besarnya yaitu Konferensi PATA ke 12 di Jakarta dan Bandung. Depari menjadi tuan rumah Konferensi PATA ke 12 tahun 1963, setelah ditunjuk pada Konferensi PATA ke 10 di Honolulu, Hawaii. Atas nama

---

<sup>164</sup> Warta Pariwisata edisi bulan September 1960. hal. 2.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>166</sup> Julius Pour.*op.cit.* hal. 106.

<sup>167</sup> Setelah penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta selesai, Indonesia dikeluarkan dari keanggotaan IOC (*International Olympic Committee*) pada tanggal 7 Februari 1963 karena menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan. Pada tanggal 13 Februari 1963, Presiden Soekarno memerintahkan untuk keluar dari IOC dan segera membentuk panitia Ganefo (*Games of New Emerging Forces*). Ganefo sendiri akhirnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 10-22 November 1963 dan diikuti oleh 51 negara.

Pemerintah Republik Indonesia, Konferensi PATA ke 12 dibuka resmi oleh Presiden Sukarno di Hotel Indonesia tanggal 18 Maret 1963, dengan *PATA Promotion Workshop* yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung.<sup>168</sup> Sebagai *President of PATA* Sri Sultan Hamengkubuwono IX, *Chairman Host Committee PATA Conference* Sri Budoyo dan *PATA Conference Secretary* Nyoman S Pedit. Konferensi PATA tahun 1963 merupakan konferensi kepariwisataan internasional pertama yang diadakan di Indonesia dan paling meriah pada saat itu. Konferensi yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari 20 negara di Asia Pasifik juga menetapkan Garuda Indonesia Airways sebagai anggota dari PATA. Konferensi ini akhirnya ditutup tanggal 22 Maret 1963 oleh Presiden Soekarno.<sup>169</sup> PATA Executive Director Marvin Plake menyatakan bahwa “*12th PATA Annual Conference in Jakarta was the most successful one so far*”. Keberhasilan konferensi ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan ramah untuk dikunjungi oleh wisatawan asing.

Kesuksesan menyelenggarakan dua *event* besar seperti Asian Games dan Konferensi PATA semakin menambah kepercayaan pemerintah kepada Depari. Kepercayaan itu muncul dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTP No.H2/4/4 tanggal 9 April 1963. Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Darat G.P.H. Djatikusumo memutuskan untuk mengangkat dan memberi kuasa penuh kepada Ketua Dewan Pariwisata Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengusahakan pembangunan hotel-hotel yang bertaraf internasional yaitu Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, Ambarukmo Palace Hotel di Jogjakarta, Argacola Palace Hotel di Surakarta dan Bali Beach Hotel di Sanur, Bali.<sup>170</sup> Dana untuk pembangunan hotel-hotel bertaraf internasional tersebut diperoleh dari dana *Pampasan Perang Jepang*. Menurut Peraturan Pemerintah No.

<sup>168</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*,hal. 11.

<sup>169</sup> Departemen Luar Negeri Indonesia. *Indonesia: Looking Back Over The Year*. 1963. hal. 179.

<sup>170</sup> Salinan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata No. H2/4/4 Tanggal 9 April 1963.

27 Tahun 1958 Tanggal 23 April 1958, Indonesia memperoleh dana US \$ 223.080.000 dalam waktu 20 tahun sejak ditandatangani 23 April 1958.<sup>171</sup>

Di tahun 1963, Indonesia di undang untuk ikut dalam *New York World's Fair 1964-1965* yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. *New York World's Fair* adalah pameran kebudayaan dari negara-negara di seluruh dunia yang yang ditampilkan melalui paviliun-paviliun. Pada tanggal 18 Januari 1963, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Depari diundang oleh Presiden *New York World's Fair*, Robert Mosses untuk meresmikan pembangunan Paviliun Indonesia.<sup>172</sup> Konsep dari Paviliun Indonesia sendiri berasal dari Presiden Soekarno dan dikerjakan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia yang dipimpin oleh M. Sudarsono bekerja sama dengan Abel Sorensen dan Max O. Urbahn.<sup>173</sup>

Paviliun Indonesia selesai dibangun tahun 1964 dan secara resmi ikut dalam *New York World's Fair 1964-1965*. Ketika memasuki Paviliun Indonesia, pengunjung harus melalui sebuah gerbang yang bernama "Tjandi Benthari". Selain itu pengunjung akan melihat di sisi sebelah kanan ada sebuah "Meru" dan kolam teratai. "Tjandi Benthari" sebagai gerbang dan "Meru" sebagai strukturnya adalah bentuk-bentuk khusus dari arsitektur Indonesia dan pastinya di kenal oleh para wisatawan yang telah mengunjungi Bali, dan dimaksudkan untuk membawa pengunjung kembali ke suasana di Indonesia.<sup>174</sup>

Paviliun Indonesia bertingkat dua dan memiliki atap seperti berbentuk payung ditambah dengan sebuah tiang ditengah yang menggambarkan bunga dengan lima kelopak untuk mencerminkan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu, refleksi kolam di paviliun juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara maritim dimana pulau-pulau yang terpisah disatukan lautan. Paviliun Indonesia juga

<sup>171</sup> Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 27 Tahun 1958 Tanggal 23 April 1958.

<sup>172</sup> Lihat Lampiran 8.

<sup>173</sup> Direktorat Jenderal Pariwisata.*op.cit.*,hal. 12.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hal 13.

dilengkapi pameran segala macam produk-produk komoditi ekspor Indonesia, pentas seni-budaya bangsa dari Sabang sampai Merauke setiap hari.<sup>175</sup> Penyelenggaraan *New York World's Fair 1964-1965* ini sukses dan Paviliun Indonesia selalu ramai dikunjungi, terutama saat akhir pekan.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan tokoh yang berpengaruh dalam mengembangkan pariwisata Indonesia. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai ketua DTI/Depari, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sri Sultan untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Hubungan antara Sri Sultan dan Presiden Soekarno memang sudah dekat sejak ibukota Republik Indonesia pada tahun 1946 hijrah dari Jakarta ke Jogjakarta. Antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Presiden Soekarno terdapat persamaan visi dalam tiga hal yaitu Olahraga, Kepanduan dan Tourisme.<sup>176</sup> Bagi Sri Sultan, olahraga, kepanduan dan tourisme adalah sebuah hobby. Sedangkan bagi Presiden Soekarno olahraga, kepanduan dan tourisme adalah wahana pendidikan dan *nation character building*.

Selain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tokoh yang juga berjasa dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia adalah Menteri Perhubungan Darat dan Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (1959-1963), Letjen G.P.H Djatikusumo. Sumbangan terbesar G.P.H Djatikusumo terhadap pariwisata Indonesia adalah lahirnya Sendratari Ramayana Prambanan. Sendratari Ramayana atau yang juga dikenal dengan istilah *Ramayana Ballet* merupakan sebuah pagelaran yang menggabungkan antara seni drama dan tari yang mengangkat cerita Ramayana. Cerita Ramayana merupakan sebuah legenda yang terpahat indah pada dinding Candi Siwa, salah satu candi yang ada di kompleks Candi Prambanan. Pementasan ini menyatukan ragam kesenian Jawa berupa tari, drama dan musik dalam satu panggung. Penonton diajak menikmati cerita dalam rangkaian gerak tari khas Jawa yang diiringi musik gamelan.

---

<sup>175</sup> Nyoman S. Pendit. *loc.cit.* hal. 6.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal.7.

Sendratari Ramayana sendiri pertama kali dipentaskan pada 28 Juli 1961 digagas langsung oleh Letjen G.P.H Djatikusumo. Pertama dipentaskan di panggung terbuka sebelah selatan Candi Prambanan dengan tujuan untuk menjadi daya tarik wisatawan.<sup>177</sup> Selain event-event besar, promosi yang dilakukan G.P.H Djatikusumo sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata dalam rangka memperkenalkan pariwisata Indonesia juga dapat dilihat melalui perangko. Di tahun 1961 ketika Indonesia ikut dalam “*Visit The Orient Year 1961*” pemerintah mengeluarkan beberapa seri perangko.<sup>178</sup> Perangko tersebut menggambarkan tentang seni dan kebudayaan Indonesia seperti tarian Dayak dan tarian Bali. Objek wisata yang disarankan untuk dikunjungi juga ditampilkan seperti Candi Borobudur, Kawah Tangkuban Perahu dan Danau Toba. Dalam penyelenggaraan Konferensi PATA ke 12 tahun 1963 di Jakarta pemerintah juga sempat mengeluarkan seri perangko Konferensi PATA ke 12 dengan bergambar Candi Prambanan dan penari Bali.<sup>179</sup>

Depari sendiri mempunyai tugas untuk mempersiapkan rancangan pembangunan dan pengembangan pariwisata sebagai media perletakan batu pertama dalam skala nasional untuk menentukan pilihan lokasi, jenis, ukuran, biaya, waktu, kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan dan peduli, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Tetapi perkembangan politik di Indonesia yang semakin memanas di tahun 1965 dan terjadi pada puncaknya ketika terjadi peristiwa G30S mengakibatkan kondisi pariwisata di Indonesia semakin menurun<sup>180</sup>. Kekacauan politik ini mengakibatkan segala sesuatu tidak menentu baik itu politik, ekonomi, dan keamanan. Pemerintahan Presiden Soekarno mau tidak mau harus melakukan perubahan-perubahan kebijakan dan pergantian kabinet yang sangat cepat karena tuntutan rakyat. Kondisi yang dihadapi oleh pemerintahan Soekarno di dalam negeri,

<sup>177</sup> Moehkardi. *Sendratari Ramayana Prambanan: seni dan sejarahnya*. Jakarta: KPG.2011.hal.80.

<sup>178</sup> Lihat lampiran 9.

<sup>179</sup> Solikhin, Salam. *G.P.H. Djatikusumo : prajurit-prajurit dari Kraton Surakarta*. Jakarta : Gema Salam. 1993. Hal. 65.

<sup>180</sup> G30S atau Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa penculikan 7 orang Jenderal TNI AD karena dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal yang hendak meng kudeta Soekarno.

membuat seluruh kegiatan akhirnya hanya terfokus dalam bidang politik. Depari di akhir tahun 1965 praktis tidak mempunyai kegiatan-kegiatan yang berarti. Dengan terbentuknya Lembaga Pariwisata Republik Indonesia di tahun 1966 maka Depari dinyatakan bubar.<sup>181</sup>



---

<sup>181</sup> H. Kodhyat.*op.cit.*,hal. 75.

## BAB V

### KESIMPULAN

Pariwisata merupakan sebuah industri yang penting untuk dikembangkan di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia seperti kondisi alam yang indah, kebudayaan yang beraneka ragam dan sejarahnya yang kuat merupakan modal bagi berkembangnya industri pariwisata Indonesia. Sejak jaman kolonial, pemerintahan Belanda yang berkuasa saat itu mulai memikirkan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai daerah tujuan wisata. Gubernur Jenderal Van Heutzs, membentuk VTV (*Vereeniging Toeristen Veerker*) di tahun 1908. Pembentukan VTV ini tidak lain adalah untuk memajukan turisme di Hindia Belanda sekaligus sebagai sumber pemasukan devisa. Dalam mengembangkan turisme di Hindia Belanda, VTV melakukan beberapa promosi pariwisata seperti penerbitan brosur-brosur, foto, poster, kartu pos dan majalah.

VTV juga bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memajukan turisme di Hindia Belanda seperti KNILM (*Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij*) dan KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*). KPM pernah membuka sebuah pelayaran untuk turis yang dikenal dengan “Bali Express”. Usaha-usaha yang dilakukan oleh VTV tergolong berhasil dalam memajukan turisme di Hindia Belanda. Hampir tiap tahun terjadi kenaikan jumlah turis asing yang datang ke Hindia Belanda. Di tahun 1942 ketika terjadi Perang Dunia ke II, dunia pariwisata sempat berhenti. Belanda yang sudah dari awal membangun kepariwisataannya di Hindia Belanda terpaksa harus pergi karena kedatangan Jepang. Pada masa Pendudukan Jepang kegiatan pariwisata di Hindia Belanda tidak berkembang dan malah justru tidak ada.

Setelah Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya dan terlepas dari penjajahan orang asing, pada saat itu juga Indonesia mulai membangun perekonomiannya yang mandiri. Sektor perhotelan dan pariwisata juga mulai

diperhatikan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pemasukan kas negara. Usaha pertama pemerintah dalam memajukan kepariwisataan di Indonesia adalah dengan terbentuknya HONET atau *Hotel Negara and Tourism* yang tugasnya adalah mengelola hotel-hotel bekas milik Belanda. Dengan ditandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar maka hotel-hotel yang dikelola oleh HONET harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula.

Di tahun 1952, pemerintah membentuk suatu badan yang mengusahakan terbukanya Indonesia menjadi daerah tujuan pariwisata yaitu *Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme*. Karena badan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana maka beberapa tokoh perhotelan Indonesia sepakat untuk membentuk organisasi Sergahti atau *Serikat Gabungan Hotel dan Tourisme Indonesia*. Organisasi ini merupakan perkumpulan dari para pemilik hotel yang ada di seluruh Indonesia. Karena Sergahti tidak bisa menjalankan tugasnya yaitu menetapkan tarif hotel dan mengosongkan penghuni tetap maka organisasi ini bubar dengan sendirinya.

Di tahun 1955 muncul organisasi yang bernama *Yayasan Tourisme Indonesia* atau yang disingkat YTI. YTI adalah badan non-komersil atau tidak mencari keuntungan. Untuk masalah pembiayaan, yayasan ini memperoleh dana dari sumbangan-sumbangan para anggotanya. Dalam waktu yang relatif singkat YTI berhasil mengembangkan organisasi ini sampai ke daerah-daerah. Puncak keberhasilan YTI adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke I di Tugu, Bogor. Hasil dalam Musyawarah Nasional Tourisme juga menetapkan bahwa Yayasan Tourisme Indonesia berganti nama menjadi Dewan Tourisme Indonesia atau disingkat DTI. Setelah musyawarah ini berhasil dilaksanakan, pemerintah mulai melihat DTI sebagai badan yang mempunyai peranan penting dalam memajukan pariwisata di Indonesia.



DTI akhirnya diakui secara resmi oleh pemerintah dan menjadi badan yang melaksanakan kegiatan pariwisata di bawah Departemen Perhubungan Darat setelah keluarnya SK Menteri Perhubungan Darat dan PTT No.H2/3/19 tertanggal 14 Maret 1960. Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih menjadi ketua DTI dikarenakan beliau mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam berdiplomasi. Pada tahun 1958, DTI juga telah bergabung dalam keanggotaan pariwisata dunia seperti PATA (*Pacific Asia Travel Association*), IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*), dan ASTA (*American Society of Travel Agents*).

Pada tanggal 3-4 Agustus 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme ke 3 di Jakarta. Musyawarah ini menghasilkan keputusan bahwa nama Dewan Tourisme Indonesia diganti menjadi Dewan Pariwisata Indonesia. Penggantian nama ini sesuai dengan petunjuk Presiden Soekarno yang ingin agar menggunakan istilah ‘pariwisata’ menggantikan ‘tourisme’ yang berasal dari bahasa Belanda. Dan sekali lagi Sri Sultan Hamengkubuwono IX masih dipercaya untuk memimpin dewan ini. Ketika akan diselenggarakan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta, DTI atau Depari masuk dalam kelembagaan Panitia Kerja Pertama atau *Organizing Committee*. Tugas Depari sendiri adalah mendampingi dan memberikan saran pemerintah dalam memperbaiki atau membangun fasilitas akomodasi seperti penginapan dan perhotelan.

Dalam perjalanannya DTI melakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha memajukan pariwisata Indonesia seperti di tahun 1961 menyelenggarakan *Indonesian Floating Fair* atau Pameran Indonesia Terapung dengan kapal Tampomas mengelilingi negara-negara di Asia Pasifik. *Indonesian Floating Fair* ini berhasil membuat peserta dari negara lain dalam Konferensi PATA ke 10 di Honolulu, Hawaii terpukau dan konferensi itu langsung menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PATA yang ke 12 pada tahun 1963 di Jakarta. Setelah berhasil

dengan *Indonesia Floating Fair*, DTI diberikan tugas dalam penyelenggaraan Asian Games IV.

Konferensi PATA ke 12 di Jakarta dan Bandung menjadi prestasi terbesar Depari sejak badan ini berdiri. Konferensi ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 22 Maret 1963 dan dibuka oleh Presiden Soekarno di Hotel Indonesia, Jakarta. Delegasi dari 20 negara-negara anggota PATA berhasil datang dan menghadiri konferensi PATA ke 12 tersebut. Keputusan penting dalam konferensi tersebut adalah ditetapkannya Garuda Indonesia Airways sebagai anggota PATA. Di tahun 1964, Depari diundang untuk mengikuti *New York World Fair 1964-1965* yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku ketua Depari membangun Paviliun Indonesia yang menggambarkan seni dan kebudayaan Indonesia di New York.

Pergolakan politik yang terjadi di akhir tahun 1965 membuat terhambatnya Depari dalam mengembangkan kepariwisataan di Indonesia. Pergantian kabinet yang sangat cepat mengakibatkan kebijakan di sektor kepariwisataan juga berubah-ubah. Di tahun 1966, di dalam Departemen Perhubungan Darat dibentuk suatu badan baru yang mengurus sektor kepariwisataan yaitu Lembaga Pariwisata Republik Indonesia atau Gatari. Dengan pembentukan Gatari tersebut maka Dewan Pariwisata Indonesia dinyatakan bubar. Walaupun hasil kerja Depari saat itu belum begitu banyak berpengaruh, namun usaha-usaha yang dilakukan merupakan pondasi awal dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia sampai terbentuknya Kementerian Pariwisata nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Majalah dan Koran:**

- Bulletin Tourisme*. edisi bulan Mei 1960
- Bulletin Tourisme*. edisi bulan April 1960.
- Bulletin Tourisme*. edisi bulan Juni 1960.
- Bulletin Tourisme*. edisi bulan Juli 1960.
- Gids voor Indie*. edisi bulan Juli 1934.
- Het Hotelblad*. edisi bulan Juni 1938.
- Tourista*. Vol. 1 No.1. Januari. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961.
- Tourista*. Vol. 1 No. 2. Februari. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961.
- Tourista*. Vol. 1 No. 3. Maret. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961.
- Tourista*. Vol. 1. No. 4. April. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961.
- Tourista*. Vol. 1. No. 5. Mei. Djakarta: Djurnal Publishing Coy. 1961.
- Warta Pariwisata*. edisi Agustus 1960.
- Warta Pariwisata*. edisi September 1960.
- Warta Pariwisata*. edisi Oktober 1960.
- Warta Pariwisata*. edisi Januari 1961.
- Nyoman S. Pendit. Bung Karno dan Pariwisata. *Harian Sinar Harapan*. Sabtu, 1 September 2001.

### **Buku:**

- Adisubrata, Winarta. *Pariwisata Indonesia: sekilas perkembangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata. 1996.
- Ananda. *Pedoman Tamasja Djawa Timur dan Bali*. Djakarta: P.T. Keng Po. 1961.
- Biro Perantjang Negara. *Laporan Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. 1956-1960*.
- Brousseau, H.C.C Clockener. *Batavia Awal Abad 20* (terj. Achmad Sunjayadi) Depok: Masup Jakarta. 2007.

- Departemen Luar Negeri Indonesia. *Indonesia*. 1961.
- \_\_\_\_\_. *Indonesia*. 1962.
- \_\_\_\_\_. *Indonesia: Looking Back Over The Year*. 1963.
- Direktorat Jenderal Pariwisata. *Pariwisata Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta. 1985.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. 1976.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. (tej. Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI-Press. 1986.
- Hutabarat, Arifin. *Padamu Negeri : Perjalanan Garuda Indonesia*. Jakarta : Ganesia PR. 1989.
- Kodhyat, H. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1996.
- Mill, Robert Christie. *Tourism: The International Business*. Singapore: Prentice-Hall. 1990.
- Moehkardi. *Sendratari Ramayana Prambanan: seni dan sejarahnya*. Jakarta: KPG. 2011.
- Muljadi, A.J. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : Rajawali Press. 2009.
- Pendit, Nyoman S. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1990.
- Picard, Michel. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: KPG. 2006.
- Poerbo, Ngr. *Melantjong di Indonesia*. Djakarta: PT. RIO. 1957.
- Pour, Julius. *Dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Karno*. Jakarta : Grasindo. 2004.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Silitonga, G (dkk). *Indonesia Tanah Airku*. Bandung: W. Van Hoeve. 1952.
- Simatupang, R.O. *Pedoman Tamasja Djakarta & sekitarnya*. Djakarta: P.T. Keng Po. 1961.

- Solikhin, Salam. *GPH Djatikusumo : prajurit-prajurit dari Kraton Surakarta*. Jakarta: Gema Salam. 1993.
- Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Sunjayadi, Achmad. *Vereeniging Toeristen Verkeer Batavia (1908-1942) Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*. Depok: FIB UI. 2007.
- Surjanto. *Kamus Istilah Pariwisata*. Jakarta: Progres. 2003.
- Tek Hong, Tio. *Keadaan Jakarta Tempo Doeloe: sebuah kenangan 1882-1959*. Depok : Masup Jakarta. 2007.
- Vickers, Adrian. *Bali: A Paradise Created*. Singapore: Periplus Edition. 1990.
- Yoeti, Oka. A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Penerbit Angkasa. 1996.
- \_\_\_\_\_. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997.
- \_\_\_\_\_. *Tours & Travel Management*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2001.

**Sumber Internet:**

- [www.kitlv.pictura-dp.nl](http://www.kitlv.pictura-dp.nl) di akses tanggal 23 Maret 2012 pukul 21.30 WIB.
- [www.nywf64.com/indones03.shtml](http://www.nywf64.com/indones03.shtml) di akses tanggal 27 Maret 2012 pukul 02.15 WIB.
- [www.koleksiprangkoindonesia.blogspot.com/2010/09/1961-visit-orient-year.html](http://www.koleksiprangkoindonesia.blogspot.com/2010/09/1961-visit-orient-year.html) diakses tanggal 16 April 2012 pukul 13.30.



Memperhatikan:

Musjawarah Tourisme Seluruh Indonesia jang telah diselenggarakan di Tugu, Puntjak (Bogor) dari tanggal 12 Djanuari 1957 sampai dengan 14 Djanuari 1957.

Mengingat:

- a. surat keputusan kami jang terachir tanggal 28 Desember 1956 No. U 14/3/16 tahun 1956 tentang tugas dan susunan organisasi Kementrian Perhubungan;
- b. keputusan Kabinet Burhanuddin Harahap dalam sidangnja ke 56 tanggal 2 Maret 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- a. mengakui dan mengesahkan Dewan Tourisme Indonesia sebagai satu-satunja badan sentral partikelir jang dari badan-badan/lembaga2/jajasan2 di daerah2 untuk membantu dan mendampingi Pemerintah dalam menunaikan tugasnja guna mengurus tourisme pada umumnja di Indonesia;
- b. Tugas Dewan Tourisme Indonesia dalam garis besarnya sebagai berikut :  
melakukan pekerjaan2 tourisme dalam lapangan masyarakat dengan pengusaha2 jang berkepentingan dalam industri tourisme dengan ketentuan bahwa semua hal2 jang bersangkutan dengan badan2 Pemerintah harus disalurkan dengan melalui Kementrian Perhubungan.

Salinan disampaikan kepada:

1. Direktur Kabinet Presiden
2. Kabinet Perdana Menteri
3. Sekretariat Dewan Menteri
4. Semua Kementrian
5. Lembaga Alat2 Pembajaran L.N.
6. Djawatan Kepolisian Negara
7. Djawatan Bea dan Tjukai
8. Djawatan Imigrasi

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

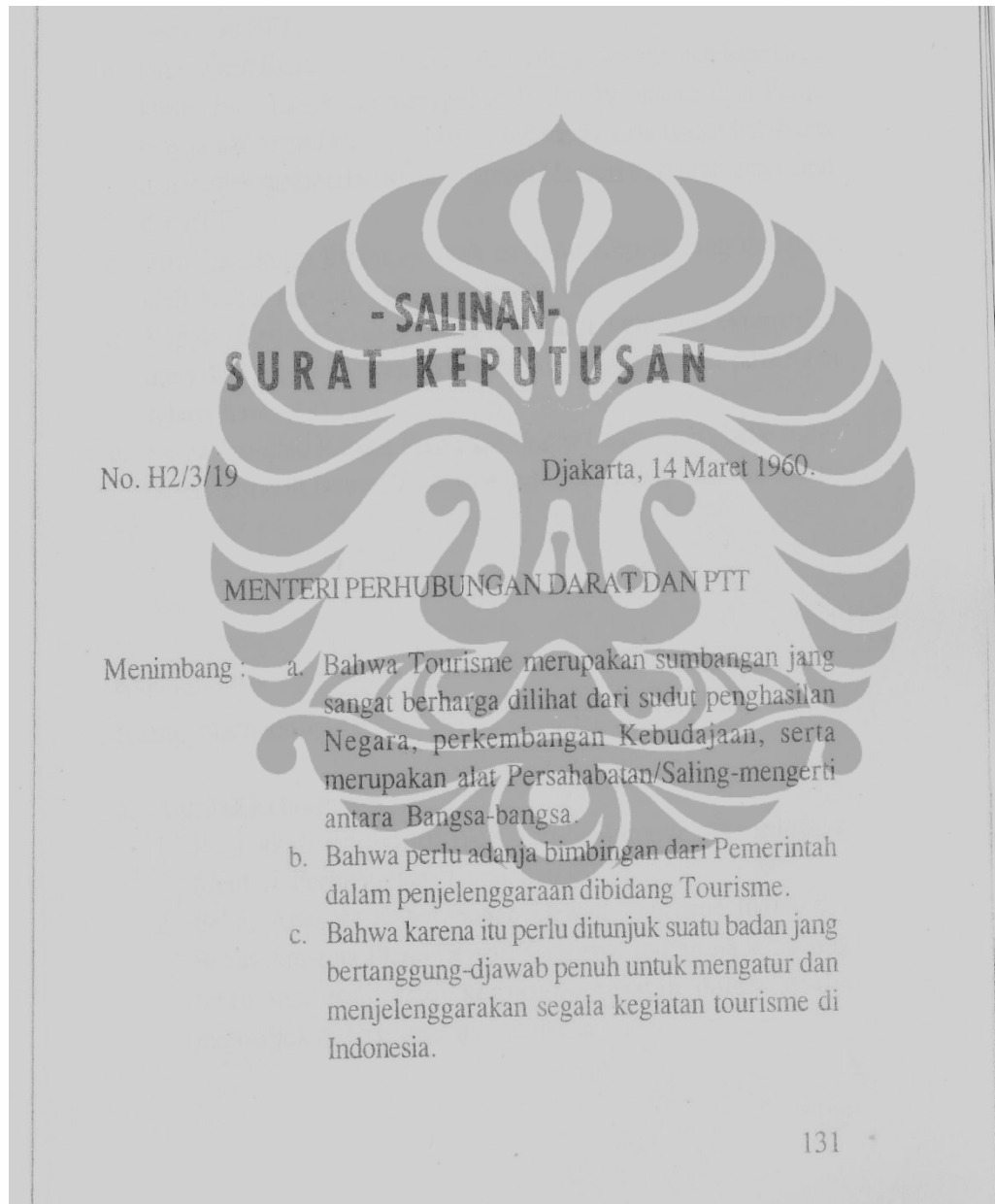
Sesuai dengan aslinja Sekretaris Djendral, ttd.

(Ir. R. Abdoelmoetalip Danoeningrat).

1 s/d 9 untuk diketahui



**Lampiran 2: SK Menteri Perhubungan Darat dan PTT No. H2/3/19, 14 Maret 1960.**



Sumber: H. Kodhyat. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1996.

d. Bahwa Dewan Tourisme Indonesia memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk seperti termasuk dalam sub c tersebut diatas, asalkan diadakan reformasi didalamnja.

- Mengingat :
- a. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Djuni 1957 No. 129 tahun 1957 tentang susunan dan organisasi Kementrian Perhubungan.
  - b. Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 8 April 1957 No. H2/2/21 tahun 1957 mengenai pengakuan dan pengesahan Pemerintah pada Dewan Tourisme Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Menunjuk Dewan Tourisme Indonesia sebagai satu-satunja Badan jang bertanggung-djawab penuh untuk mengatur dan menjelenggarakan segala kegiatan Tourisme di Indonesia.
- II. Mengadakan Penjusunan kembali (Reformasi) Dewan Tourisme Indonesia sebagai berikut.

#### Pasal I

Badan ini bernama Dewan Tourisme Indonesia atau disingkat DTI dengan terdjemahan dalam bahasa Inggeris "Indonesian Council for Tourisme".

#### Pasal II

Tugas.

Badan ini bertugas membantu dan mendampingi Pemerintah dalam penjelenggaraan kebijaksanaan untuk usaha memadjukan Tourisme dalam arti kata dan tjara jang seluas-luasnya.

### Pasal III

Pimpinan.

- a. Badan ini dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh dan langsung bertanggung-djawab kepada Menteri Perhubungan Darat dan PTT.
- b. Pekerjaan Ketua sehari-hari dilaksanakan/dibantu oleh Biro Eksekutif. Biro Eksekutif merupakan Badan Pelaksana dari Penjelenggaraan tugas Dewan Tourisme Indonesia serta Badan Pelaksana dan Penjelenggara dari kebijaksanaan Menteri Perhubungan Darat dan PTT.
- c. Biro Eksekutif dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia.
- d. Kepala Biro Eksekutif menjadi wakil ketua eksekutif dan mewakili Ketua Dewan Tourisme Indonesia dalam pekerjaan sehari-hari.
- e. Ketua dan/atau Kepala Biro Eksekutif Dewan Tourisme Indonesia mewakili Dewan Tourisme Indonesia keluar dan ke dalam.

### Pasal IV

Keanggotaan.

Keanggotaan terdiri dari:

- a. Anggota Kehormatan.
  1. Yang akan ditunjuk oleh Ketua dengan persetujuan Menteri Perhubungan Darat dan PTT.
  2. Bekas Anggota Kehormatan Dewan Tourisme Indonesia. Bekas Anggota Pleno Dewan Tourisme Indonesia lama yang telah menundukkan kegiatan-kegiatan dalam usaha memajukan tourisme di Indonesia.

- b. Anggota Ex-Officio.  
Pedjabat-pedjabat Pemerintah jang karena djabatannja bersangkut-paut dengan usaha memandjukan Tourisme (antara lain petugas dari Djawatan Penerbangan Sipil, Djawatan Pelajaran Niaga, Djawatan Kebudayaan, Direktur Djendral Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Sekretaris Djendral Departemen Penerbangan, Djawatan Harga dan lain-lain badan jang dianggap perlu).
- c. Anggota Perusahaan.  
Perusahaan jang mempunjai sangkut-paut langsung atas usaha-usaha jang langsung dalam penjelenggaraan Tourisme (antara lain GIA, PELNI, NITOUR, dan lain-lain badan jang dianggap perlu).
- d. Anggota Pelengkap.  
Wakil-wakil atau Badan-badan Perusahaan-perusahaan jang merupakan alat pelengkap dalam penjelenggaraan Tourisme jang perusahaannja bersifat regional, lokal swasta dan lain-lainja.
- e. Anggota Peserta.  
Wakil-wakil atau Badan-badan Kebudayaan/Badan Penjiaran atau badan lain perseorangan jang dianggap ada sangkut-pautnja dengan usaha memadjukan Tourisme.
- f. Anggota Peserta Istimewa.  
Wakil-wakil badan lain atau perseorangan-perseorangan jang dianggap ada sangkut-pautnja serta menundjukkan semangat dalam usaha-usaha memadjukan Tourisme.

#### Pasal V

Sidang-sidang.

- a. Sekurang-kurangnja sekali dalam 2(dua) tahun dibawah pimpinan Ketua Dewan Tourisme Indonesia diadakan Musjawarah Nasional untuk memadjukan pariwisata dimana diundang hadir seluruh anggota Dewan Tourisme Indonesia dan kalangan-

- kalangan jang dianggap perlu oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia.
- b. Musjawarah Nasional merupakan Konsultasi untuk usaha-usaha memajukan Tourisme.
  - c. Musjawarah memilih beberapa anggota untuk mendjadi tjalon anggota Komite Konsultatip termasuk dalam Pasal VI.

#### Pasal VI

Pembentukan Komite Konsultatip.

- a. Ketua membentuk Komite Konsultatip jang bertugas memberi nasehat atas permintaan Ketua Dewan Tourisme Indonesia, dan jang susunannja akan ditentukan kemudian oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia.
- b. Anggota-anggota Komite Konsultatip diangkat oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia.
- c. Anggota Komite Konsultatip dapat diundang bersidang oleh Ketua Biro Eksekutip Dewan Tourisme Indonesia, sekurang-kurangnya sekali dalam 4(empat) bulan.
- d. Ketua Dewan Tourisme Indonesia dapat mengundang Komite Konsultatip sewaktu-waktu, apabila dipandang perlu.
- e. Ketua dapat memberi tugas kepada anggota-anggota Dewan Tourisme Indonesia untuk membentuk Biro Eksekutip Dewan Tourisme Indonesia.

#### Pasal VII

Keuangan.

Keuangan Dewan didapat dari:

- a. Pembeajaan Departemen Perhubungan Darat dan PTT
- b. Iuran dari perusahaan-perusahaan/industri jang ada sangkut-pautnja dengan tourisme.
- c. Sumbangan-sumbangan jang tak mengikat.
- d. Usaha-usaha lainnja jang sah.

### Pasal VIII

Organisasi-organisasi Tourisme Daerah.

- a. Pembentukan Dewan Tourisme di daerah-daerah baik bentuk dan susunannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Tourisme Indonesia.
- b. Pemimpin ditunjuk/diangkat/disetujui oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia Pusat.
- c. Organisasi-organisasi Tourisme Daerah menjadi/merupakan organisasi-organisasi vertikal.

### Pasal IX

Ketentuan Peralihan.

- a. Anggota Pleno Dewan Tourisme Indonesia yang terdiri dari 26 orang dari Djakarta yang menjatakan kesediaannya akan diangkat sebagai Anggota Kehormatan Dewan Tourisme Indonesia oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia.
- b. Sebagai Biro Eksekutif ditetapkan seluruh Staf Dewan Tourisme Indonesia bersama seluruh Staf Bagian Tourisme Departemen Perhubungan Darat dan PTT.

Biro ini akan terdiri dari:

1. Biro Organisasi
2. Biro Hubungan Luar-Negeri
3. Biro Hubungan Pers & Masyarakat (Publik Relations)
4. Biro khusus
5. Biro perundang-undangan
6. Biro-biro lain yang dianggap perlu.

### Pasal X

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan dan diputuskan kemudian oleh Ketua Dewan Tourisme Indonesia dengan persetujuan Menteri Perhubungan Darat dan PTT.

## Pasal XI

Untuk pertama kali diangkat sebagai Ketua Dewan Tourisme Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

## Pasal XII

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daja-surut sampai tanggal 3 Maret 1960.

MENTERI PERHUBUNGAN DARAT DAN PTT

ttd.

G.P.H.Djatikusumo

Djendral Major TNI nrp 14703

Tembusan kepada :

1. Semua Departemen
2. Dewan Tourisme Indonesia

Salinan kepada :

Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Untuk salinan sesuai dengan aslinja:

Pembantu Utama Urusan Pelaksanaan.

ttd.

P. Suharto

Major Zi nrp 219019





dan functioneel dalam bidang2 jang langsung berhubungan dengan perkembangan fasilitas2 kepariwisataan.

3. bahwa sampai pada dewasa ini belum diambil langkah2 jang effectief guna perkembangan lebih landjut daripada penguasaan dan pengusaha Hotel2 jang diserahkan atas dasar surat Keputusan Menteri Pertama No.:584/M.P./1960 tgl. 28 Desember 1960 kepada Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata.
4. bahwa untuk kepentingan pengurus Hotel2 jang telah diserahkan maupun jang sudah berada dibawah wewenang Departemen maupun untuk usaha2 pelaksanaan pembangunan selandjutnja daripada perkembangan fasilitas2 kepariwisataan dapat memikul tanggung-djawab tersebut.

- Mengingat :
- a. Pasal 17 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
  - b. Keputusan Presiden tanggal 18-2-1960 No.: 21 tahun 1960.
  - c. Surat Sekretaris Dewan Mentri tanggal 31-8-1959 No.: 25174/59.
  - d. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat , Pos, Telekomuikasi dan Pariwisata No.: U 14/12/4 tgl. 9-8-1960.
  - e. Surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, pos, Telekomunikasi dan Pariwisata No.: H 2/3/19 tgl. 14-3-1960.
  - f. Surat Keputusan Menteri Pertama No.: 584/M.P./1960 tgl. 28-12-1960.

- g. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata No.: u 14/20/22 tgl. 9-11-1961.
- h. Surat Kuasa Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata No.: A 7/1/1 tgl. 15 Djanuari 1962.
- i. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata No.: H 2/3/25 tgl. 8 April 1963.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengangkat dan memberi Kuasa penuh kepada Ketua Dewan Pariwisata Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penguasa untuk bertindak dan bertanggung djawab untuk dan atas nama Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata :

- a. melakukan pembangunan Hotel2 baru menurut surat2 perdjandjian antara Pemerintah dan P.N. Pembangunan Perumahan tentang projek2 Samudra Hotel di Pelabuhan Ratu, Ambarukmo Palace Hotel di Jogjakarta, Argacola Palace Hotel di Surakarta dan Bali Beach Hotel di Sanur Bali.
- b. Mempersiapkan pembangunan Hotel2 lain maupun bangunan kepariwisataan lainnja dalam rangka pembangunan projek fasilitas kepariwisataan jang masih diperlukan untuk perkembangan kepariwisataan selandjutnja.

- c. mempersiapkan dan kemudian mengurus pemilikan, penguasaan maupun perusahaan Hotel2 maupun gedung2 yang sedang dibangun ataupun sudah dibangun ataupun akan dibangun selanjutnya.
- d. mengurus pemilikan, penguasaan maupun perusahaan Hotel2/Gedung2/perusahaan2 yang sudah dikuasai oleh Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertama tgl. 28 Desember 1960 No.: 584/M.P/1960 maupun yang akan diserahkan kepada dan akan dikuasai oleh Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
- e. mengadakan tindakan yang dipandang perlu yang bersifat penyeragaman dan/maupun koordinatif dalam organisasi pengurusan penguasaan maupun perusahaan selanjutnya daripada Perusahaan2/Hotel2/Bangunan2 yang sudah ada dibawah kekuasaan dan wewenang Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata maupun yang sedang dibangun ataupun yang akan diserahkan kepada Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
- f. untuk membentuk Badan2 Hukum yang dipandang perlu yang akan mengurus pemilikan, penguasaan maupun perusahaan Perusahaan2/Hotel2/Gedung2 sebagai milik Negara :

1. jang Sedang dibangun.
  2. jang akan dibangun.
  3. jang akan diserahkan kepada Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
  4. jang akan dikuasai oleh Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertama No.: 584/M.P./1960 tgl. 28 Desember 1960.
- g. untuk mengadakan Perundingan2 dan mengadakan kontrak2 dengan pihak ketiga mengenai pembangunan bangunan2 kepariwisataan, managementnja maupun pendidikan pegawai2 managementnja.
- h. mengatur dengan Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia mengenai pembeajaan dalam Negeri dari projek2 jang sedang berdjalan, jang akan dilaksanakan maupun jang sedang disiapkan.
- i. mengusahakan dan membimbing serta mengembangkan sekolah2 Kedjuruan Perhotelan di Bandung maupun di tempat2 lain jang akan didirikan kemudian, akademi Perhotelan jang berada di Bandung dan Kursus2, lembaga2 pendidikan lainnja jang sekarang sudah dikuasai oleh Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, untuk mendidik tenaga2 bagi penguasaan dan pengusahaan dari bangunan2/Hotel2 kepariwisataan serta untuk mengatur pembeajaannja.

**Lampiran 4 : SK Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Badan Penasehat Perusahaan Tourisme.**

Surat keputusan Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. Republik Indonesia tentang pembentukan Panitia, Badan Penasehat Perusahaan Tourisme

-----

No. H 2/9/10.- DJAKARTA, 2 Agustus 1960.

MENTERI PERHUBUNGAN DARAT DAN P.T.T.

MEMBATJA : a. Surat Menteri Perdagangan R.I. tanggal 24 Nopember 1959 No. : 7442/M.;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah tanggal 23 Djanuari 1960 No. Pem.62/1/1;  
c. Surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 31 Mei 1960 no. 1/27/4/M.K.;

MENIMBANG : a. Bahwa dianggap perlu adanya suatu Panitia yang merupakan Badan Penasehat yang bertugas memberi nasehat dan petunjuk guna membantu Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. dalam mendjalankan kebijaksanaan guna pemberian izin kepada Perusahaan Tourisme;  
b. Bahwa untuk keperluan pembentukan Panitia Badan Penasehat tersebut diperlukan suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Pasal 4 ayat 3 surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 8 Djuli 1959 No. H 2/8/1.  
2. Surat keputusan Perdana Menteri R.I. tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954.

M E M U T U S K A N :

MENENTIKAN:

Pertama : Membentuk suatu Panitia yang merupakan Badan Penasehat yang diberi tugas memberi nasehat dan pendapat kepada Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. dalam mendjalankan kebidjaksanaannya guna pemberian izin kepada Perusahaan Tourisme.

Kedua : Badan penasehat tersebut terdiri dari :  
1. Sdr. Sri Sultan Hamangku Buwono IX, Ketua D.T.I. sebagai anggauta merangkap Ketua,  
2. Sdr. Anwar Soelaiman wakil dari Departemen Perhubungan Darat dan P.T.T., sebagai anggauta merangkap Sekretaris.  
3. Sdr. Drs. Siswadji, Adjun Komisaris Besar Polisi wakil Departemen Kepolisian sebagai anggauta.  
4. Sdr. Moch. Enoch, Kepala Djawatan Harga Departemen Perdagangan, Wakil Departemen Perdagangan sebagai anggauta.  
5. Sdr. Oeripan, Ahlipradja Tk.I pada Direktorat Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Wakil Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai anggauta.

Ketiga : Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T., sebelum mengambil sesuatu keputusan dalam mendjalankan kebidjaksanaannya mengenai pemberian izin, terlebih dahulu mendengar nasehat-nasehat dan pendapat-pendapat Badan Penasehat.

- 18 -

- Keempat : a. Kepada Ketua, anggota dan Sekretaris Panitia bu-  
kan anggota, memberikan uang sidang sebesar Rp...  
20.-- (dua puluh rupiah) tiap kali hadir dalam  
sidang dan sebanjak-banjaknja Rp. 40.-- (empat -  
puluh rupiah) sehari, sedangkan kepada pembantu  
Sekretaris dapat diberikan pengganti kerugian se-  
banjak seperdua (setengah) dari uang sidang yang  
diberikan kepada Ketua dan anggota Panitia.
- b. Untuk keperluan administrasi Panitia tsb. dan ke-  
perluan hidangan pada waktu sidang dapat diberi -  
kan biaya seperlunya.
- c. Biaya2 tersebut bab. a dan b diatas dapat dibeban  
kan pada sub a 70, 3. 1. 41. dari anggaran belan-  
dja tahun dinas yang bersangkutan.
- Kelima : Durat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal  
ditetapkannya.
- F O R M A T I K A N Surat keputusan ini disampaikan kepada yang ber-  
kepentingan untuk diketahui dan dipergunakan se-  
perlunya.

MENTERI PERHUBUNGAN DARAT DAN P.T.T.

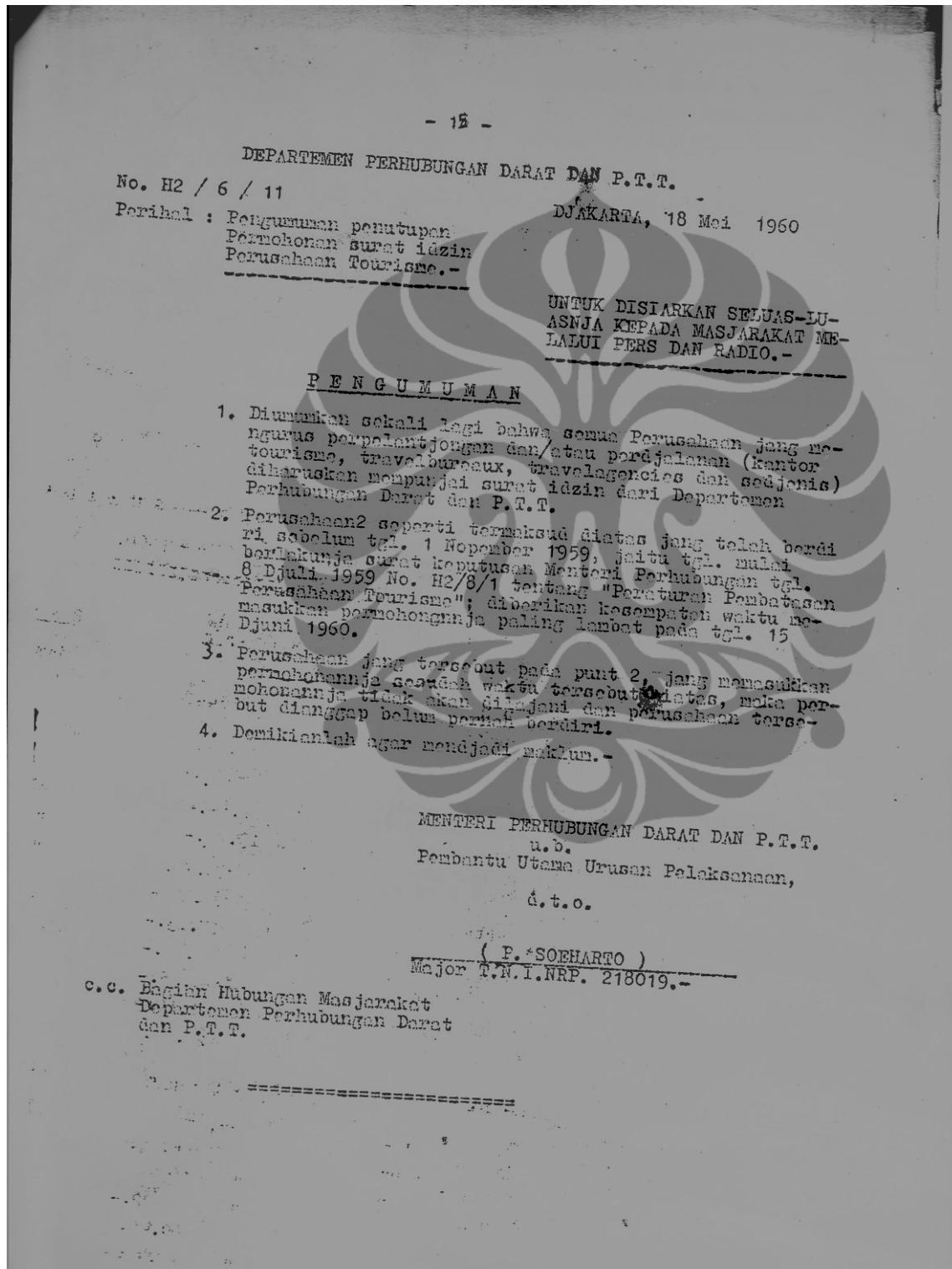
(G.P.H. DJATIKUSURO)

Djenderal Major T.N.I. Nrp. 14703.

BALINAN dikirimkan kepada:

1. Semua Departemen
2. Direktur Kabinet Presiden
3. Direktur Kabinet Menteri Pertama
4. Sekretaris Dewan Menteri
5. Dewan Pengawas Keuangan
6. Kantor Pusat Perbendaharaan
7. Djawatan Perdjalan
8. Thesaurir Djenderal Dept. Keuangan
9. Kabinet Menteri Pertama
10. Dewan Tourisme Indonesia
11. Kepala bagian Keuangan Departemen  
Perhubungan Darat dan P.T.T.

## Lampiran 5 : SK Pembatasan Perijinan Perusahaan Tourisme





Lampiran 6 : Poster Official Tourist Bureau, Singapore Kolff & Co, 1935.



Sumber : [www.kitlv.pictura-dp.nl](http://www.kitlv.pictura-dp.nl) di akses tanggal 23 Maret 2012 pukul 21.30 WIB.




## Lampiran 7 : Iklan PT. PELNI

**PELNI**

**P. T. „PELAJARAN NASIONAL INDONESIA“**  
(**Indonesian National Shipping Coy. Ltd.**)

**Head Office** : DJALAN ANGKASA DJAKARTA, INDONESIA  
TILPON : GAMBIR 2371, 2351, 2042

**Cable Address** : PELNI DJAKARTA



**Flagship** : M. S. „TAMPOMAS“ All Rooms and Cabins Airconditioned  
4133 B.R.T.

*SEE BALI THE WORLD-FAMOUS TOURIST RESORT  
BY M.S. „TAMPOMAS“*

**Services for Cargoes and Passengers**

Agents in all important ports throughout Indonesia, in Singapore, Penang, Rangoon, Bangkok, and Bussum (Netherlands).

Also participating in the shipping conferences viz. Djakarta Freight Conference, Java New York Rate Agreement and Java Pacific Rate Agreement for the incoming and outgoing cargo.

Sumber : Ngr Poerbo. *Melantjong di Indonesia*. Djakarta: PT. RIO. 1957.

**Lampiran 8 : Paviliun Indonesia dalam New York World's Fair 1964-1965.**



Sumber : [www.nywf64.com/indones03.shtml](http://www.nywf64.com/indones03.shtml) di akses tanggal 27 Maret 2012 pukul 02.15 WIB.

**Lampiran 9 : Perangko Penyelenggaraan Konferensi PATA ke 12 di Jakarta dan “Visit The Orient Year 1961”**







**Lampiran 10. Maket pembangunan Bali Beach Hotel, Samudera Beach Hotel dan Ambarrukmo Pallace Hotel.**



Sumber: Departemen Luar Negeri Indonesia. *Indonesia*. 1962. Hal. 95.